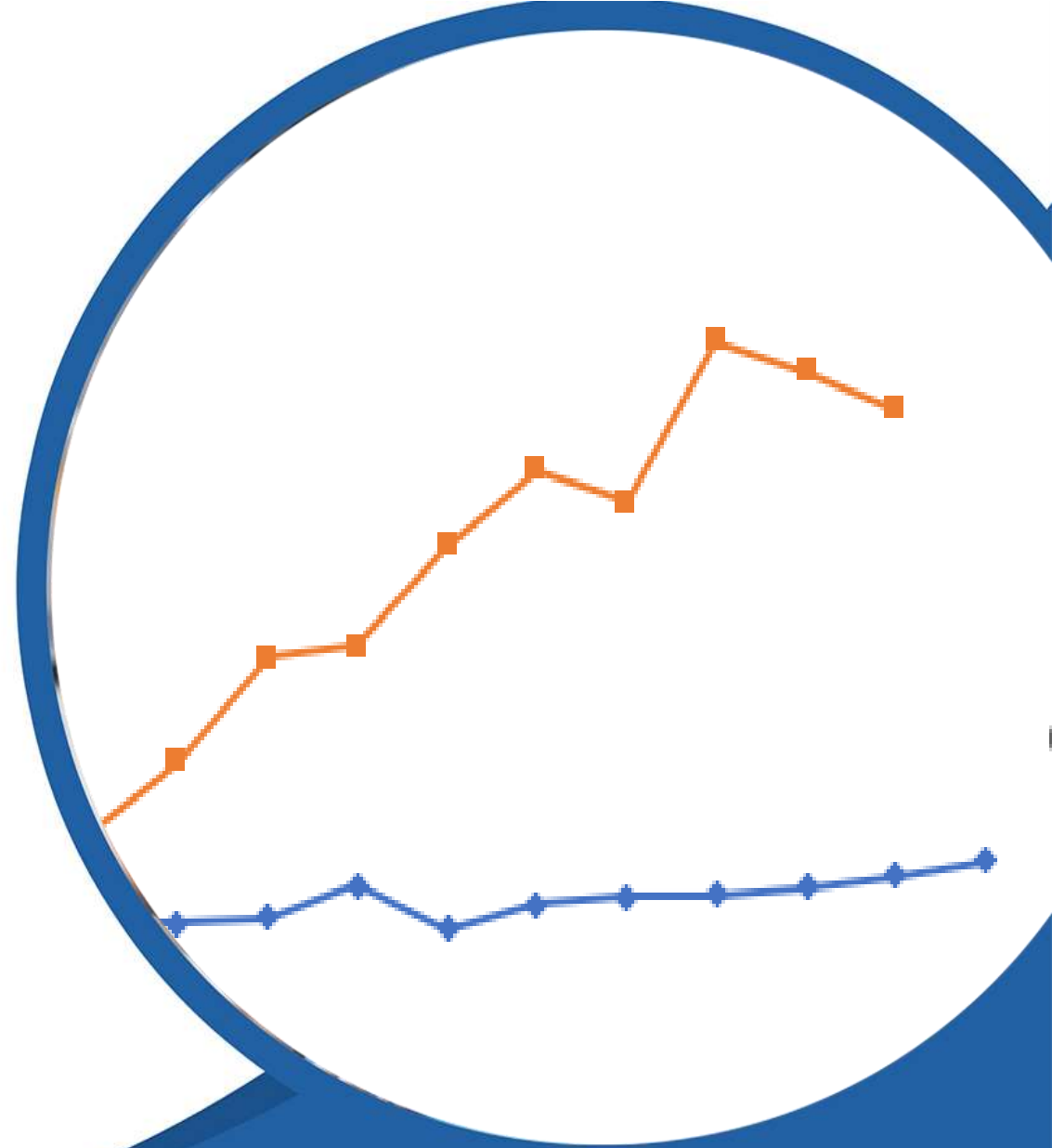


# Proyeksi Ekonomi Indonesia 2023 Mengelola Ketidakpastian Ekonomi di Tahun Politik

Senin, 5 Desember 2022

Institute for Development of Economics and Finance

INDEF



# 1. Konstelasi Ekonomi Global dan Dinamika Perekonomian Domestik

## 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Global

- Tahun 2022 merupakan tahun ketiga berlangsungnya pandemi Covid-19. **Dunia mulai beradaptasi** dengan berbagai penyesuaian baik dari sisi kehidupan ekonomi, interaksi sosial hingga penggunaan teknologi.
- Kondisi **perekonomian beberapa negara juga terlihat sudah menunjukkan sisi pemulihan**. Hal tersebut tercermin dari kembali meningkatnya pertumbuhan ekonomi di berbagai negara meski **dengan tingkatan yang berbeda-beda**.
- Ekonomi global diperkirakan akan menghadapi ketidakpastian pada 2023 hal ini menyusul fenomena **inflasi tinggi global** dan **respon kenaikan suku bunga** serentak Inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan di seluruh dunia terutama di Amerika Serikat dan Eropa. sebagai dampak ekonomi dari **perang di Ukraina** **Kondisi keuangan global juga telah mengetat** karena bank sentral terus menaikkan suku bunga.

## Tantangan Global Pasca Pandemi



Sumber: diolah, Faisal Basri , 2022

# 1. Konstelasi Ekonomi Global dan Dinamika Perekonomian Domestik

## 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Global

Revisi Berkala Proyeksi Ekonomi Global 2023

World	Jan'22	Apr'22	Jul'22	Oct'22
2022	4.4	3.6	3.2	3.2
2023	3.8	3.6	2.9	2.7
Advanced Economies				
2022	3.9	3.3	2.5	2.4
2023	2.6	2.4	1.4	1.1
United States				
2022	4.0	3.7	2.3	1.6
2023	2.6	2.3	1.0	1.0
Euro Area				
2022	3.9	2.8	2.6	3.1
2023	2.5	2.3	1.2	0.5
EM & Developing Economies				
2022	4.8	3.8	3.6	3.7
2023	4.7	4.4	3.9	3.7
China				
2022	4.8	4.4	3.3	3.2
2023	5.2	5.1	4.6	4.4
India				
2022	9.0	8.2	7.4	6.8
2023	7.1	6.9	6.1	6.1

## Tujuh Faktor Membuat Pertumbuhan Ekonomi Rendah di 2023

**Invasi Rusia terhadap Ukraina** berdampak pada berbagai aspek, mulai dari aspek sosial-politik hingga ekonomi.

**Inflasi tinggi** yang dihadapi berbagai negara di dunia terjadi.

**Suku bunga**

**Resesi**

**Zero Covid** di China (kebijakan tanpa covid).

**Ketidakstabilan sosial** akibat gejolak ekonomi di atas maupun dinamika politik internasional dan nasional merebak di berbagai negara.

**Risiko fragmentasi** merupakan akibat lanjutan dari dinamika geoekonomi dan geopolitik yang saling terkait satu sama lainnya

Sumber: IMF, 2022

# 1. Konstelasi Ekonomi Global dan Dinamika Perekonomian Domestik

## 1.2 Dinamika Perekonomian Domestik

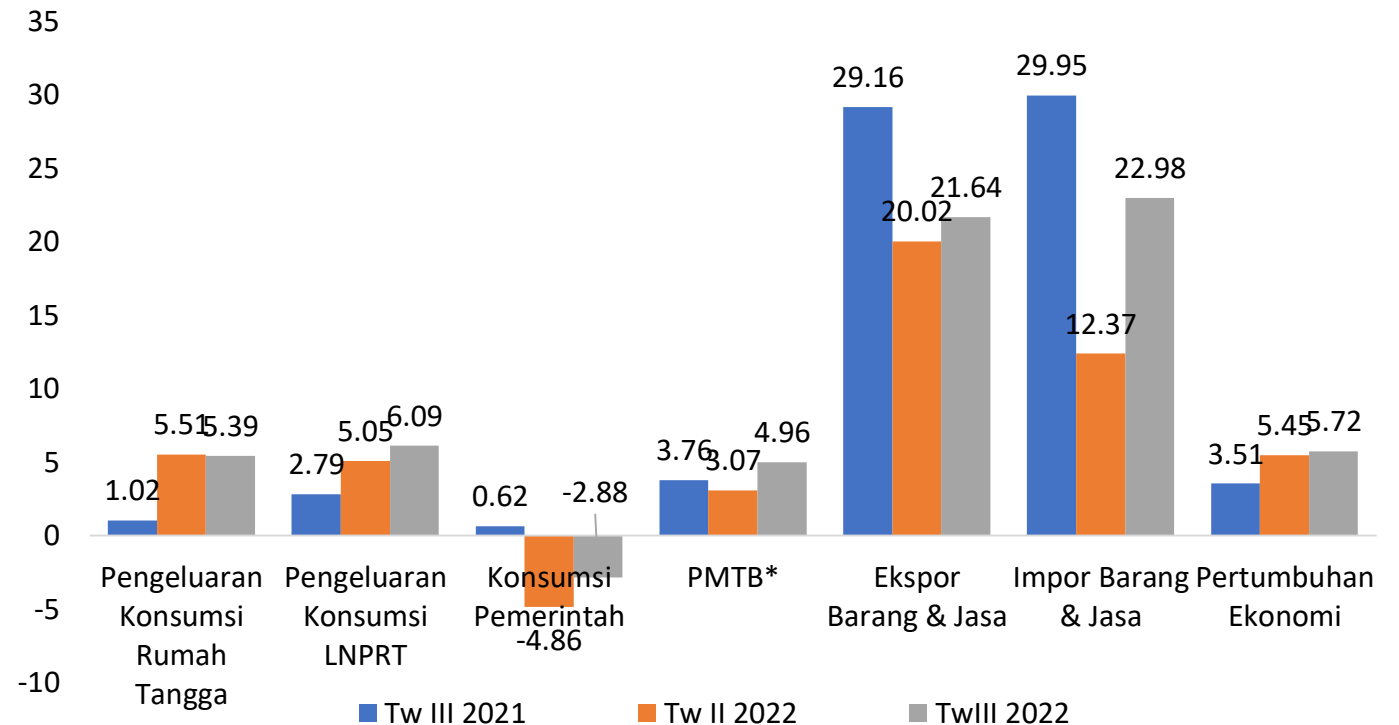
### Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian domestik 2022 diwarnai tren pemulihan meski dihadapkan pada berbagai tantangan:

- Inflasi tinggi,
- Depresiasi rupiah,
- Tren kenaikan suku bunga,
- Kenaikan harga BBM,
- PHK

Indonesia telah berhasil menjadi presidensi G20 pada 2022. Presidensi G20 Indonesia terbilang tidak mudah untuk dilaksanakan, karena dimulai ketika pandemi Covid-19 yang masih berlangsung ditambah konflik Rusia dan Ukraina.

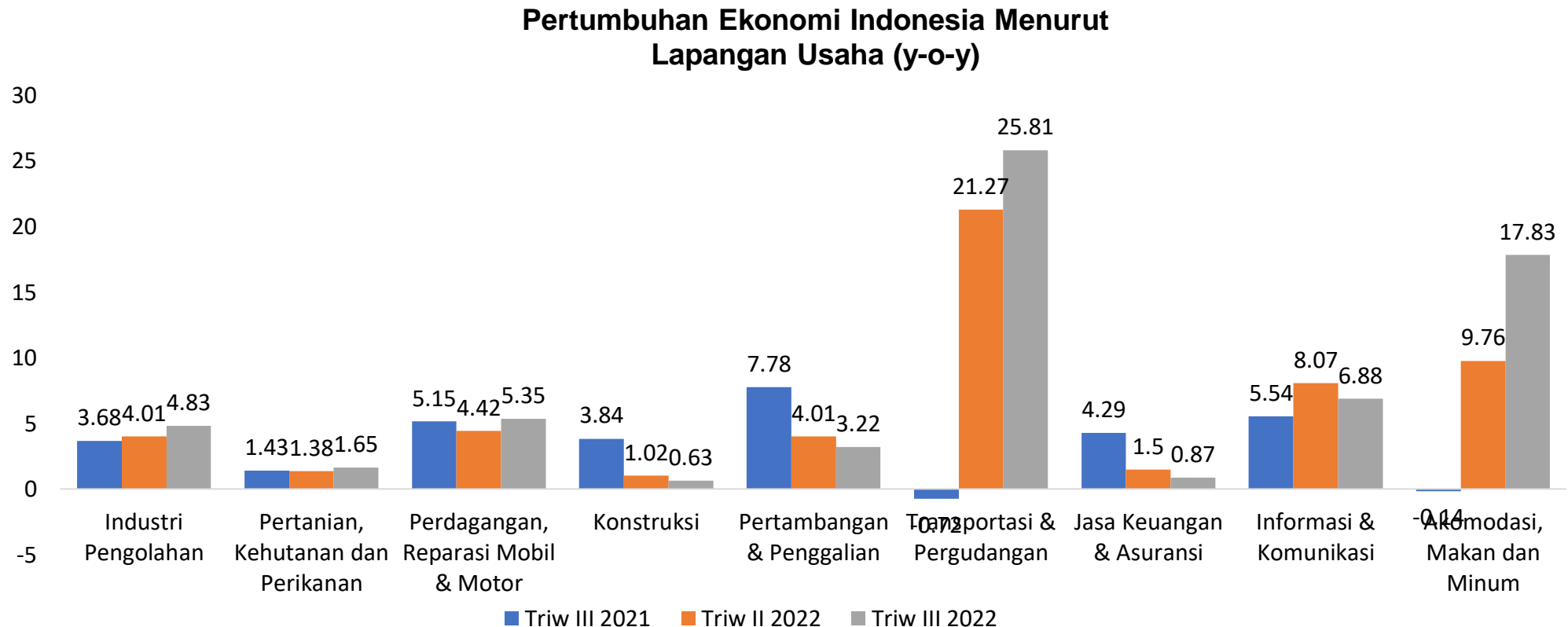
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurut Pengeluaran (y-o-y)



Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

# 1. Konstelasi Ekonomi Global dan Dinamika Perekonomian Domestik

## 1.2 Dinamika Perekonomian Domestik Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

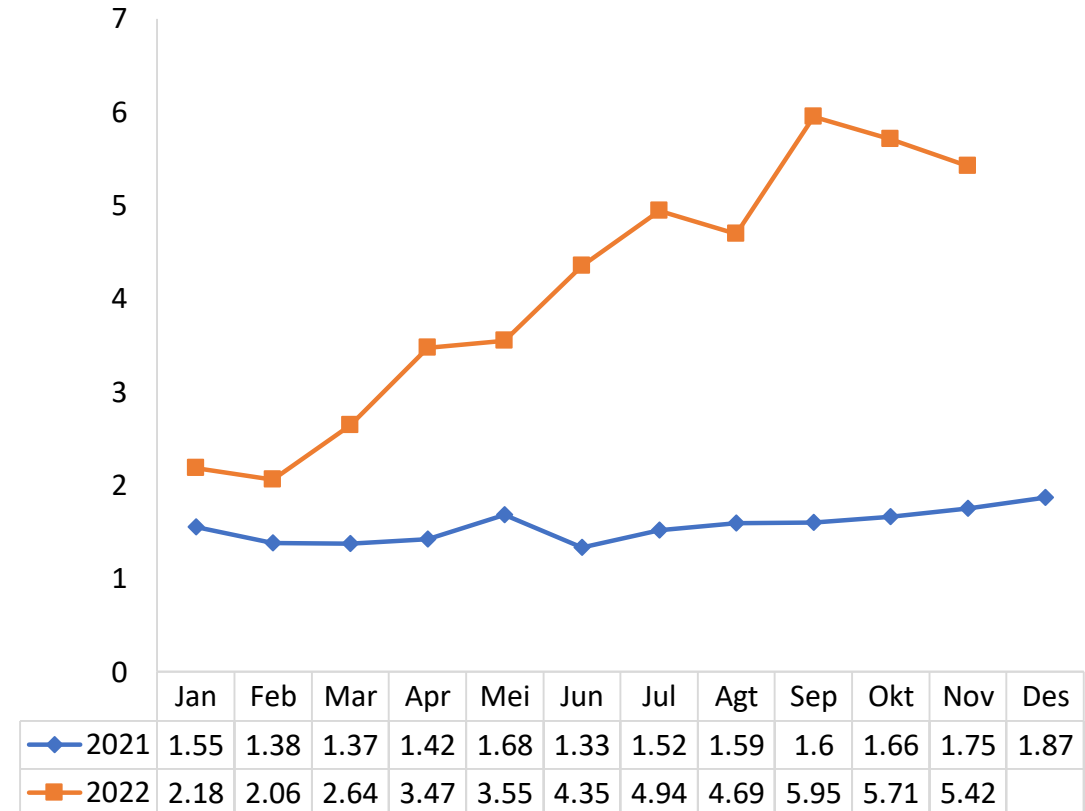
# 1. Konstelasi Ekonomi Global dan Dinamika Perekonomian Domestik

## 1.2 Dinamika Perekonomian Domestik

### Perkembangan Sektor Moneter

- Laju inflasi yang menunjukkan tren meningkat disebabkan karena sisi penawaran seiring dengan kenaikan harga-harga komoditas dunia dan juga ada gangguan pasokan global dan domestik.
- Penyumbang utama inflasi tahunan di antaranya adalah komoditas bensin, bahan bakar rumah tangga, dan tarif angkutan udara.
- Pada November 2022, penyumbang utama inflasi bulanan di antaranya adalah komoditas telur ayam ras, rokok kretek filter, dan tomat

Tingkat Inflasi Bulanan Indonesia (y-o-y)

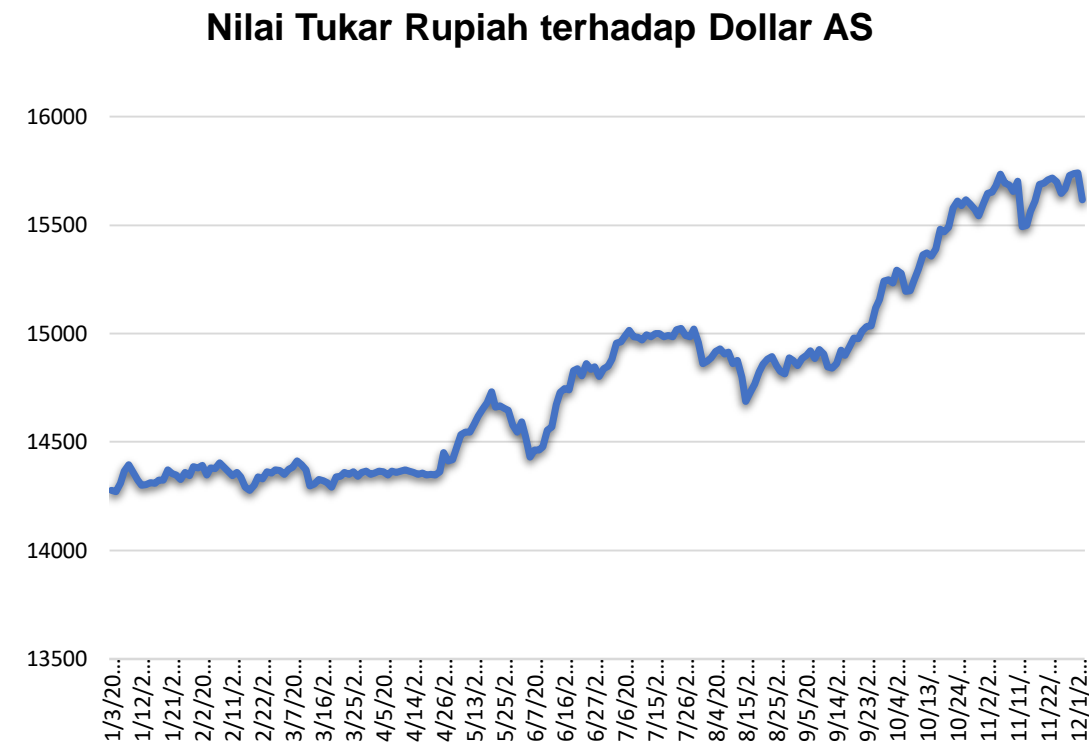


Sumber: Bank Indonesia(2022)

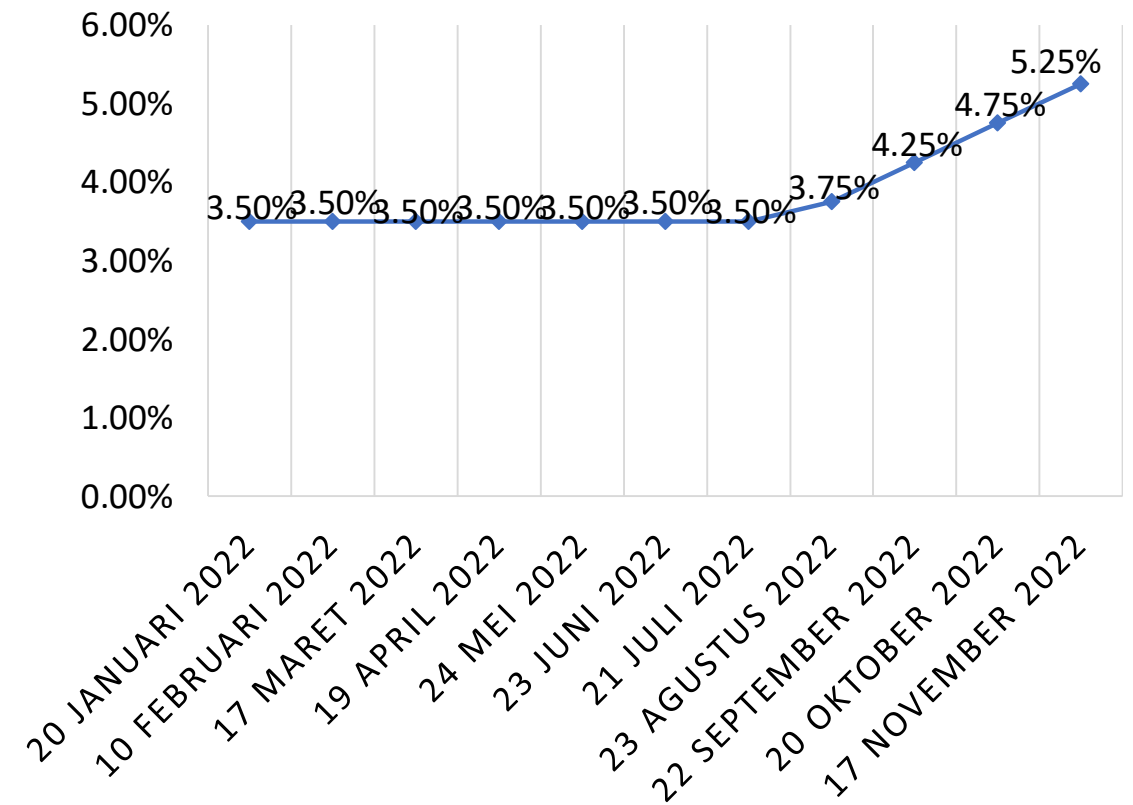
# 1. Konstelasi Ekonomi Global dan Dinamika Perekonomian Domestik

## 1.2 Dinamika Perekonomian Domestik

### Perkembangan Sektor Moneter



### Perkembangan BI-7Day-RR Pada 2022



Sumber: Bank Indonesia(2022)

# 1. Konstelasi Ekonomi Global dan Dinamika Perekonomian Domestik

## 1.2 Dinamika Perekonomian Domestik

### Perkembangan Sektor Fiskal

#### Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara Hingga September 2022

Instrumen APBN (Rp Triliun)	2021		2022	
	Realisasi s.d Sept	Growth (%)	Realisasi s.d Sept	Growth (%)
<b>A. Pendapatan Negara</b>	1,354.99	16.81	1,974.74	45.74
Pendapatan Dalam Negeri	1,353.96	17.30	1,974.15	45.81
<b>1. Penerimaan Perpajakan</b>	1,032.98	15.75	1,542.64	49.34
a. Pajak	850.06	13.25	1,310.50	54.17
b. Kepabeanan & Cukai	182.92	28.98	232.14	26.91
<b>2. PNBPN</b>	320.98	22.59	431.50	34.43
Penerimaan Hibah	1.03	-82.00	0.59	-42.80
<b>B. Belanja Negara</b>	1,806.87	-1.87	1,913.87	5.92
<b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>	1,265.40	4.44	1,361.19	7.57
1. Belanja K/L	733.98	16.11	674.37	-8.12
2. Belanja Non K/L	531.42	-8.29	686.82	29.24
<b>II. Transfer Ke Daerah</b>	541.47	-14.01	552.68	2.07

Sumber: Kemenkeu, 2022



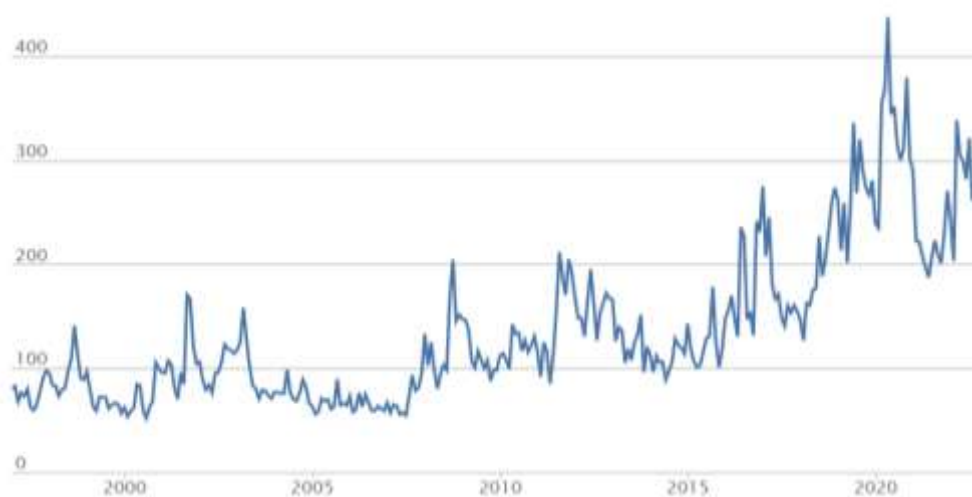
# 1. Konstelasi Ekonomi Global dan Dinamika Perekonomian Domestik

## 1.3 Ketidakpastian Ekonomi di Tahun Politik

### Tingkat Global

Konstelasi politik geopolitik perang Rusia-Ukraina yang melebar, membuat ketidakpastian kebijakan ekonomi global meningkat.

### Index Ketidakpastian Kebijakan Ekonomi Global Desember 1996-September 2022



Sumber: [policyuncertainty.com](https://policyuncertainty.com) (2022)

### Tingkat Domestik

Ketidakpastian yang belum dibaca namun sangat penting di dalam negeri adalah tahun depan adalah kontestasi dari calon-calon Presiden untuk masa jabatan periode 2024-2029. Di saat yang sama, presiden saat ini akan meninggalkan legacy bagi masyarakat dengan hal-hal yang sangat populis. Lebih jauh dari itu, ikut memberikan dukungan secara samar, bahkan mungkin secara nyata dalam pencapresan mendatang. Karena itu tahun depan akan banyak dilontarkan visi-visi ekonomi yang tentu saja dari hal tersebut akan tercermin beragam ketidakpastian.

- Ketidakpastian yang paling penting adalah kebijakan-kebijakan ekonomi yang telah diputuskan sebelumnya apakah masih dilanjutkan atau tidak.
- Ketidakpastian lain yang akan dihadapi adalah sejauhmana pemerintah akan memberikan dukungan terhadap gejolak ekonomi global.
- Ketidakpastian tahun depan juga disebabkan persepsi pasar terhadap calon-calon presiden.
- Ketidakpastian di tahun politik adalah adanya gesekan gesekan yang terjadi di masyarakat.
- Tahun politik juga berarti belanja-belanja yang berhubungan dengan upaya merebut hati para pemilih (voter) akan semakin diintensifkan.

## 2. Investasi dan Hilirisasi di tengah Biaya Tinggi

### 2.1. Tantangan Investasi di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

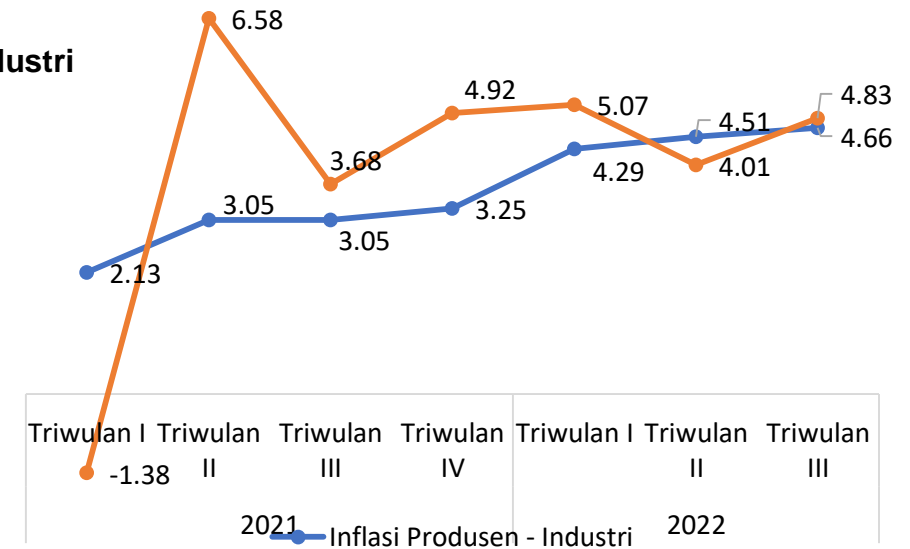
- Isu resesi global yang disebabkan oleh melemahnya permintaan dunia sudah ditunjukkan pada beberapa indikator, diantaranya penurunan Purchasing Managers' Index (PMI).
- Di tingkat global PMI Manufaktur pada Oktober 2022 mencapai 49,4 (dari 49,8 di September). Penurunan output didominasi pada sektor barang setengah jadi. Hal ini menunjukkan optimisme bisnis turun mendekati level terendah dalam dua setengah tahun terakhir.

- Sinyal tanda bahaya terhadap melemahnya permintaan global menjadi tantangan bagi kinerja industri dan investasi di dalam negeri. Inflasi yang tinggi juga menjadi ancaman pada peningkatan biaya produksi.

#### Pertumbuhan Industri dan Inflasi Harga Produsen Sektor Industri



Sumber: J.P Morgan dan S&P Global (2022)



Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

## 2. Investasi dan Hilirisasi di tengah Biaya Tinggi

---

### 2.1. Tantangan Investasi di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

Catatan mengenai tantangan investasi khususnya pada sektor

Isu dan gejala resesi yang dimotori pelemahan permintaan dunia

Potensi perlambatan perdagangan dunia

Daya Tarik investasi negara-negara peers, khususnya dalam menarik relokasi investasi dari perusahaan-perusahaan Tiongkok

Kenaikan biaya logistik, transportasi dan bahan baku manufaktur

Tren *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) yang meningkat

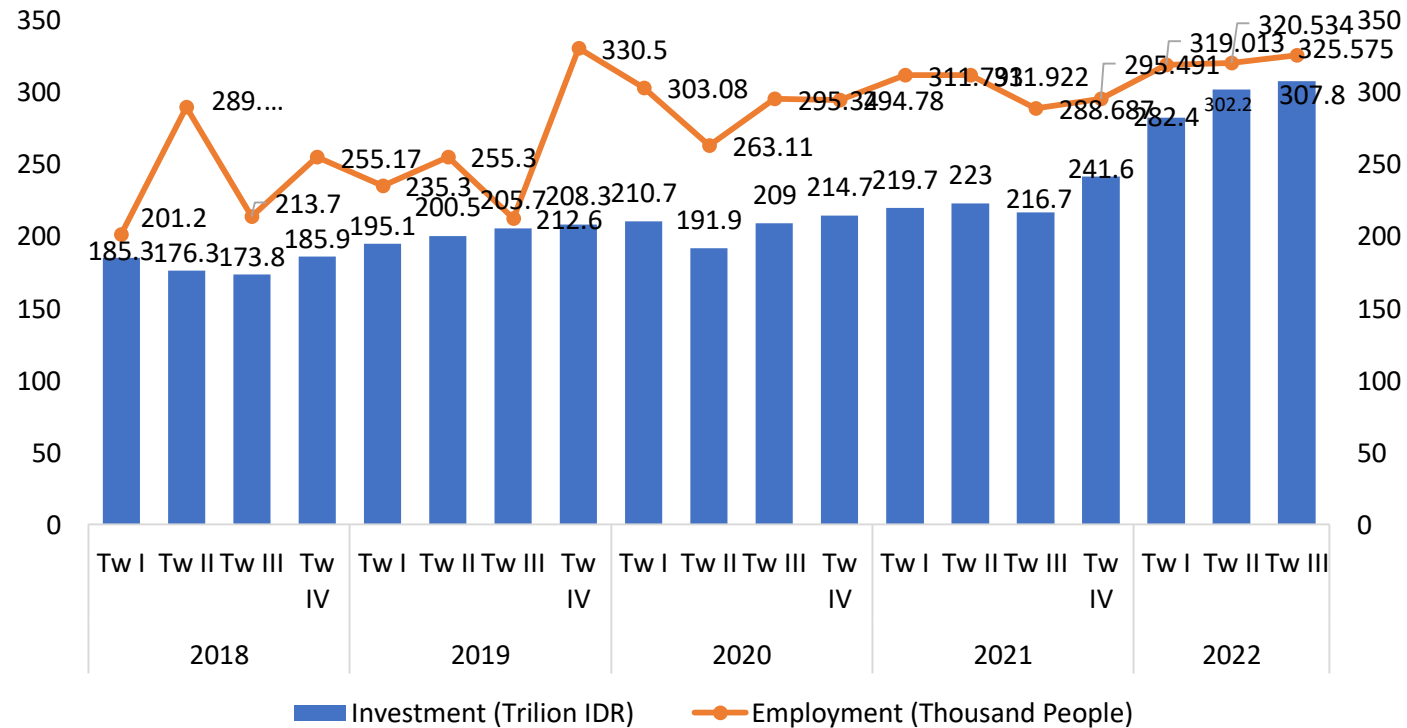
Investasi yang masuk tidak menunjang produktivitas.

Menghadapi tahun politik di Indonesia

## 2. Investasi dan Hilirisasi di tengah Biaya Tinggi

### 2.2. Akselerasi Investasi Tanpa Kesempatan Kerja dan Industrialisasi

Realisasi Investasi Langsung dan Penyerapan Tenaga Kerja



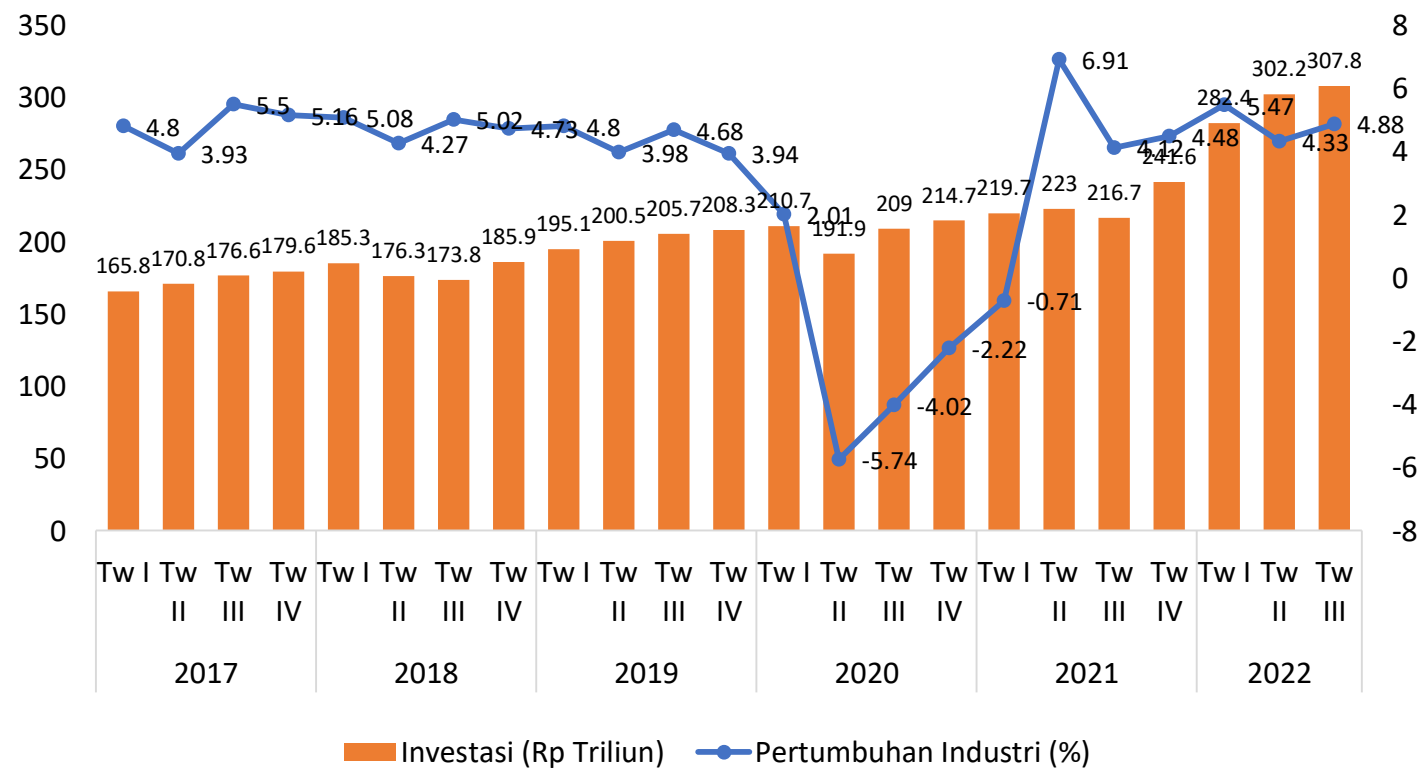
- Selama 5 tahun terakhir tepatnya sejak Triwulan III 2017, tambahan penyerapan tenaga kerja baru mampu tumbuh 13,65 persen, sedangkan diperiode yang sama aliran investasi telah tumbuh 74,3 persen.
- Hal ini menunjukkan bahwa investasi langsung (PMA maupun PMDN) yang terealisasi tidak terkonsentrasi pada sektor padat karya dan cenderung ke arah penyerapan tenaga kerja.
- Sehingga kegiatan penanaman modal belum berdampak terhadap kesempatan kerja yang luas. Hal ini menjadi kekhawatiran di saat kondisi manufaktur yang diprediksi akan berkontraksi akibat pelemahan ekonomi global, maka penggunaan input produksi termasuk *labor cost* akan dikurangi, sehingga terhadap ancaman terhadap meningkatnya pengangguran.

Sumber: BKPM, 2022

## 2. Investasi dan Hilirisasi di tengah Biaya Tinggi

### 2.2. Akselerasi Investasi Tanpa Kesempatan Kerja dan Industrialisasi

Realisasi Investasi Langsung dan Penyerapan Tenaga Kerja



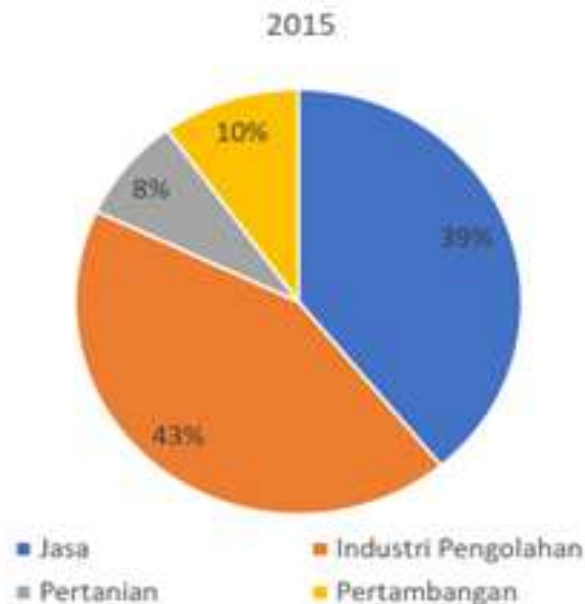
- **Pertumbuhan investasi tidak disertai dengan laju pertumbuhan industri pengolahan yang juga tinggi.** Seperti pada triwulan III 2022, pertumbuhan investasi mampu mencapai 42,1 persen (y-o-y) namun industri pengolahan (non migas) hanya tumbuh 4,88 persen dan masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.
- **Mengarahkan investasi agar semakin banyak masuk ke sektor manufaktur** menjadi tantangan besar bagi proses industrialisasi dan hilirisasi sumber daya alam strategis. Mengingat saat ini visi besar Pemerintah adalah untuk mewujudkan transformasi ekonomi dengan penciptaan nilai tambah melalui hilirisasi industri.

Sumber: BKPM, 2022

## 2. Investasi dan Hilirisasi di tengah Biaya Tinggi

### 2.2. Akselerasi Investasi Tanpa Kesempatan Kerja dan Industrialisasi

**Distribusi Investasi PMA Berdasarkan Sektor Utama**



**Distribusi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Utama**



- Investor semakin condong masuk ke sektor jasa. Pada 2015, distribusi investasi pada sektor jasa mencapai 39 persen dan sektor industri mencapai 43 persen.
- Namun saat ini (triwulan III 2022) investasi di sektor jasa telah memimpin capaian realisasi investasi dengan kontribusi yang mencapai 42 persen. Sementara sektor industri pengolahan telah turun menjadi 41 persen.

Sumber: BKPM, 2022

## 2. Investasi dan Hilirisasi di tengah Biaya Tinggi

---

### 2.3. Membangun Interelasi Investasi dan Hilirisasi Sumber Daya Strategis

Investasi merupakan instrumen pembentuk Produk Domestik Bruto dan penting bagi pertumbuhan ekonomi. Investasi akan berdampak positif pada proses produksi dalam kegiatan usaha, sehingga berdampak terhadap kesempatan kerja, pendapatan masyarakat dan konsumsi rumah tangga. Untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, Indonesia perlu melakukan berbagai hal. Salah satunya yaitu dengan mewujudkan hilirisasi industri.

**Strategi membangun Interelasi Investasi dan Hilirisasi Sumber Daya strategis antara lain:**

1. Peningkatan produktivitas sektor hulu dengan investasi teknologi produksi
2. Pengaturan ekspor bahan baku agar industri pengolahan dapat dengan mudah mengakses bahan baku yang siap untuk dihilirisasi
3. Peningkatan teknologi pasca panen dan pengolahan dengan mengundang investor yang memiliki teknologi tinggi dan keinginan untuk alih teknologi
4. Penyiapan insentif bagi sektor hulu hingga industri hilir untuk setiap produk terpilih
5. Pembangunan industri produk turunan sumber daya alam melalui investasi, guna meningkatkan nilai tambah produk serta memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor
6. Pembangunan industri pendukung baik pendukung sektor hulu maupun industri hilir
7. Peningkatan kapasitas SDM di sisi hulu, intermediate hingga hilir

## 2. Investasi dan Hilirisasi di tengah Biaya Tinggi

### 2.3. Membangun Interelasi Investasi dan Hilirisasi Sumber Daya Strategis

Sementara itu program untuk menstimulus investasi hilirisasi antara lain:

a.1. Optimalisasi pemanfaatan SDM dalam negeri, dengan cara pengaturan kran ekspor yang dievaluasi secara berkala. Agar produk bahan baku SDA di dalam negeri dapat terserap di dalam negeri, maka perlu investasi di sisi intermediate hingga hilir

a.2. Penguatan iklim investasi hilirisasi SDA melalui penyederhanaan perizinan usaha dan insentif fiskal maupun non fiskal. Selain itu, perlu adanya dukungan dari infrastruktur dasar dan pendukung

a.3. Promosi investasi dan Kerjasama dengan negara mitra

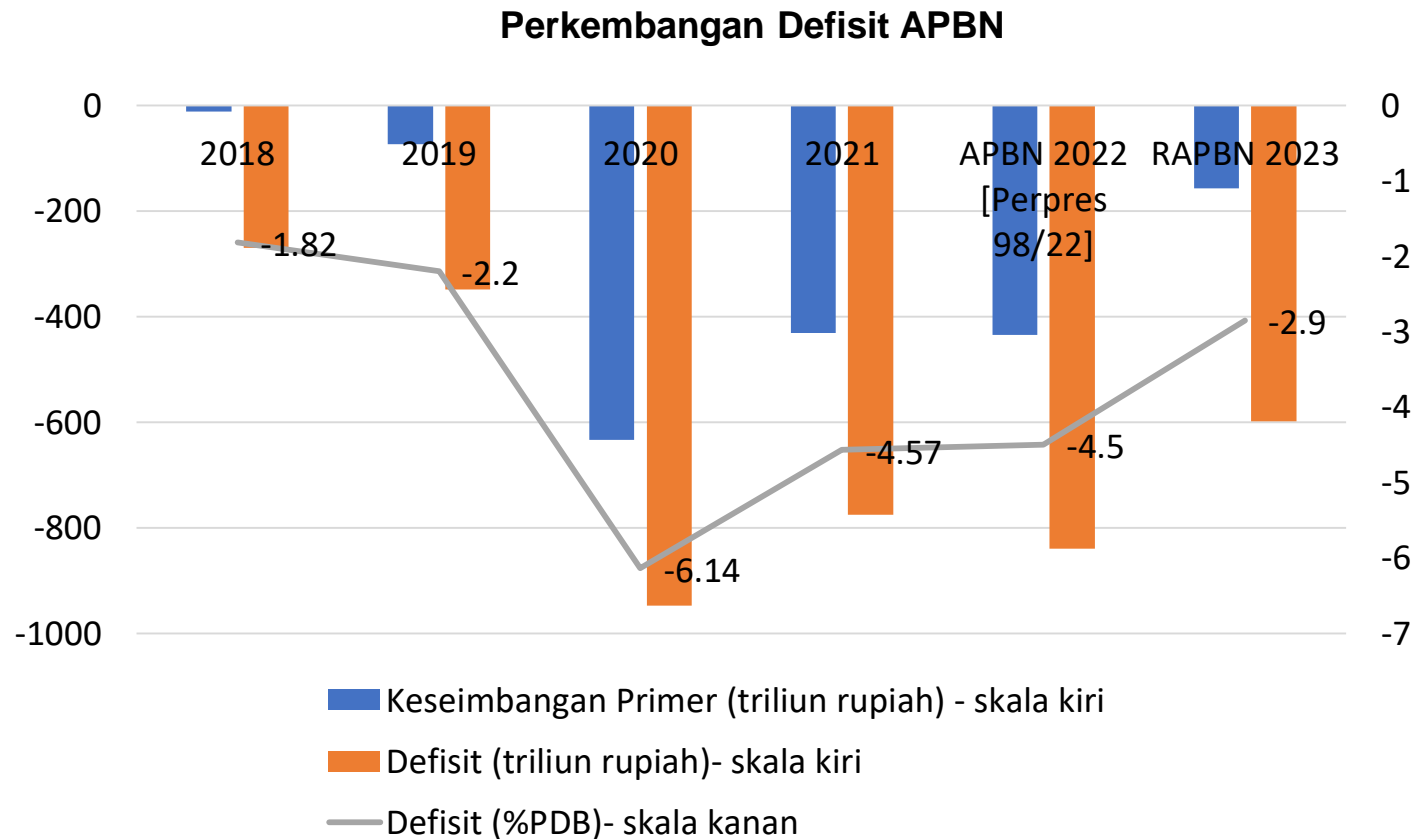
- Promosi investasi dapat didahului dengan Identifikasi produsen dan pemegang teknologi global dalam industri hilir
- Mengikuti kegiatan pameran perdagangan dan industri di bidang industri hilir dari SDA strategis dan membuka kontak intensif dengan para investor yang berpotensi melakukan investasi di Indonesia
- Penyediaan informasi untuk pengembangan industri hilir
- Negoisasi bilateral maupun regional untuk bekerjasama dalam pengembangan rantai pasok global di Indonesia

a.4. Program pembelian Pemerintah dan BUMN/D (Government Procurement) yang mengutamakan produk hilir dalam negeri atau memiliki tingkat komponen dalam negeri. Dengan demikian investor akan memiliki kepastian pasar yakni dalam mengisi belanja barang/modal pemerintah dan BUMN/D. Dengan meningkatnya kepastian pasar, investor akan lebih tertarik untuk berinvestasi di lokasi yang memiliki kepastian pasar bagi produknya.



### 3. Ketahanan Fiskal dan Respon Kebijakan Moneter di tengah Gejolak Ekonomi

#### 3.1. Konsolidasi fiskal di tengah gejolak dan paska pandemi



Di 2023 angka defisit kembali sesuai dengan Penjelasan Pasal 12 ayat 3 Undang Undang No 17 Tahun 2003, yaitu defisit anggaran dibatasi maksimal 3 persen dan utang maksimal 60 persen dari produk domestik bruto.

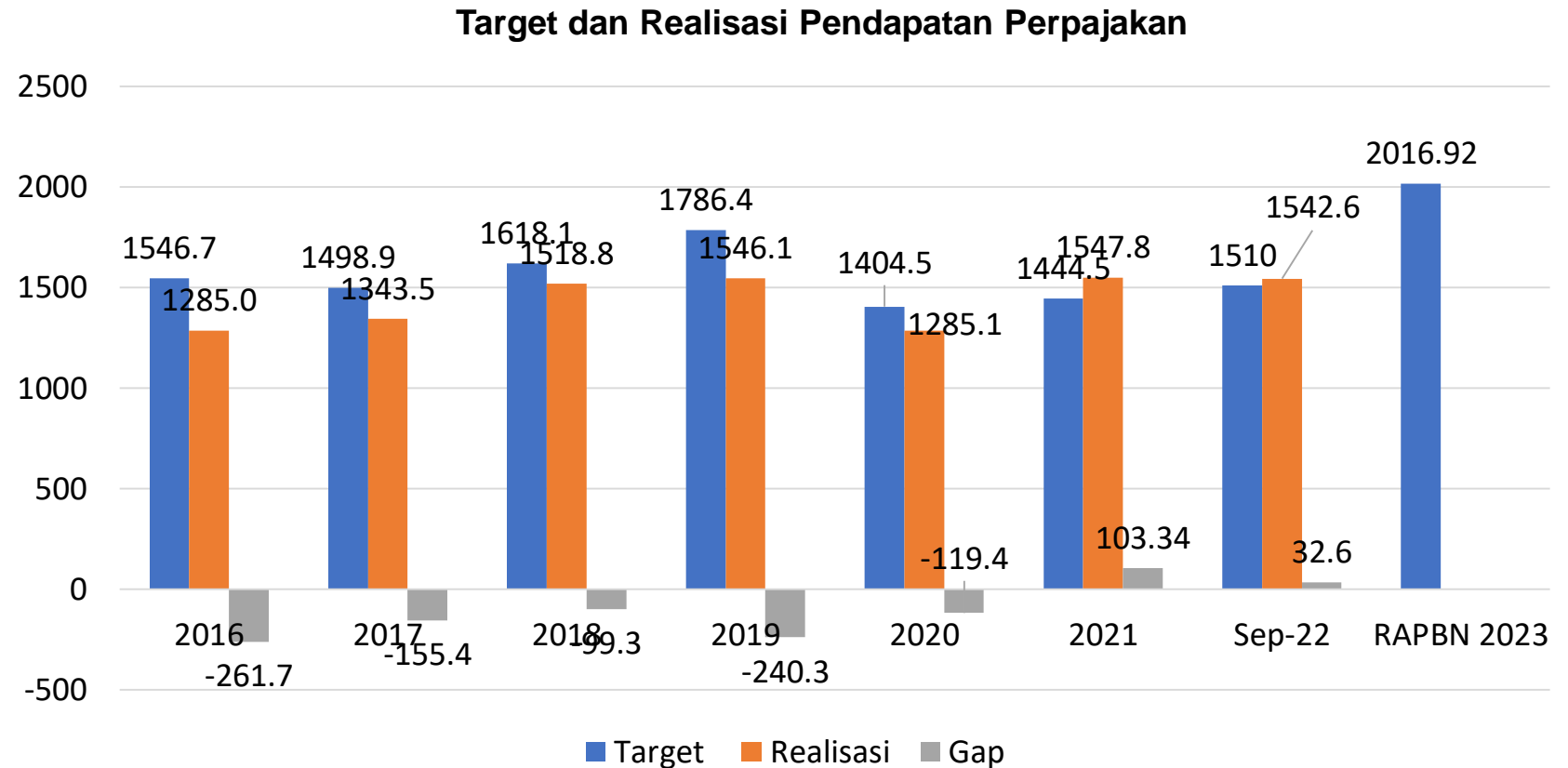
Dengan mengembalikan aturan ini, maka Pemerintah dapat menekan angka rasio utang pemerintah terhadap PDB, karena penarikan utang Pemerintah tidak sebesar ketika pandemi berlangsung.

Sumber: Kemenkeu, November 2022

### 3. Ketahanan Fiskal dan Respon Kebijakan Moneter di tengah Gejolak Ekonomi

#### 3.1. Konsolidasi fiskal di tengah gejolak dan paska pandemi

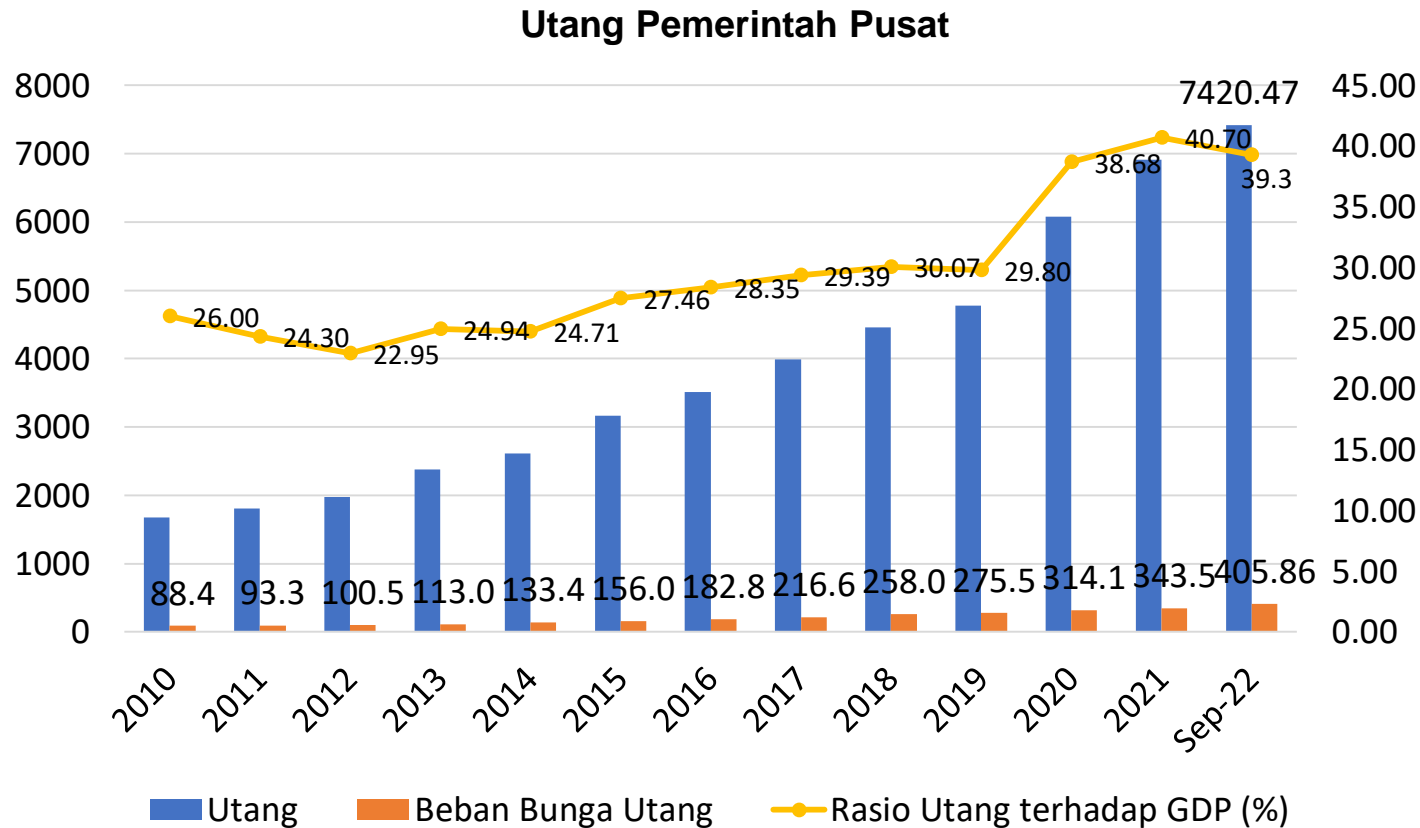
- Tingginya harga komoditas ekspor Indonesia di tingkat global dan implementasi UU Harmonisasi Perpajakan membuat target pajak optimis melebihi target di 2022, sam aseperti penerimaan pajak di 2021.
- Penerimaan perpajakan yang lebih target ini dapat mengurangi defisit APBN.



Sumber: Kemenkeu, November 2022

### 3. Ketahanan Fiskal dan Respon Kebijakan Moneter di tengah Gejolak Ekonomi

#### 3.2. Ruang Fiskal dan Utang Pemerintah Pusat



Sumber: Kemenkeu, November 2022

- Bunga utang Indonesia terus meningkat tiap tahunnya, sehingga porsi nya di total belanja pemerintah pusat mencapai 17 persen.
- Indikator ketahanan fiskal yang dilihat dari *debt to GDP ratio*, *debt to income ratio*, *debt service ratio to revenue*, dan *interest to revenue ratio* dalam satu dekade terakhir mengalami tren peningkatan dengan puncaknya di 2020.
- Pada 2020 nilai *debt to GDP ratio* sebesar 39.4 persen; *debt to income ratio* sebesar 368.9 persen; *debt service ratio to revenue* sebesar 46.8 persen; dan *interest to revenue ratio* sebesar 19.1 persen.
- Peningkatan indikator fiskal terjadi terutama ketika terjadi lonjakan rata-rata akumulasi utang pemerintah sebesar 475.92 triliun rupiah sejak 2011-2021. Selain itu, keseimbangan primer pada anggaran 2022 dan 2023 yang masih negatif menunjukkan bahwa ada risiko keterbatasan ruang gerak untuk mengurangi beban utang.

### 3. Ketahanan Fiskal dan Respon Kebijakan Moneter di tengah Gejolak Ekonomi

#### 3.2. Ruang Fiskal dan Utang Pemerintah Pusat

Postur Belanja Pemerintah Pusat  
(% terhadap Total Belanja Pemerintah Pusat)

Uraian	2018	2019	2020	2021	Outlook 2022	RAPBN 2023
Belanja Pegawai	23.8	25.1	20.8	19.4	17.6	19.8
Belanja Barang	23.9	22.3	23.0	26.5	17.1	17.0
Belanja Modal	12.7	11.9	10.4	12.0	9.8	8.9
Pembayaran Bunga Utang	17.7	18.4	17.1	17.2	17.0	19.8
a. Dalam Negeri	16.4	17.0	16.2	16.6	16.5	19.1
b. Luar Negeri	1.3	1.4	0.9	0.5	0.5	0.7
Subsidi	14.9	13.5	10.7	12.1	12.0	13.3
a. Subsidi Energi	10.5	9.1	5.9	7.0	8.8	9.4
b. Subsidi Non-Energi	4.4	4.3	4.8	5.1	3.2	3.9
Belanja Hibah	0.1	0.4	0.3	0.2	0.2	0.0
Belanja Sosial	5.8	7.5	11.0	8.7	6.1	6.7
Belanja Lain Lain	1.1	0.8	6.5	4.0	20.1	14.4

Sumber: Kemenkeu, diolah 2022

- Belanja modal porsinya dalam belanja pemerintah pusat kembali ke masa sebelum pandemi di 2022, di 2023 porsinya semakin menyusut.
- Hal ini karena sumber pendanaan infrastruktur yang dilakukan tidak hanya bersumber dari APBN tapi juga dengan skema public private partnership (bekerjasama dengan swasta) dan juga diserahkan pada swasta termasuk investor asing. Pemerintah juga mendirikan berbagai lembaga dan perusahaan untuk mendukung pendanaan proyek infratraktur seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, dan lainnya.
- Namun demikian, risiko keuangan pada akhirnya akan tetap jatuh ke APBN sebagai the last resource. Sehingga perlu sangat hati-hati dalam implementasi kerjasama pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur.

# 3. Ketahanan Fiskal dan Respon Kebijakan Moneter di tengah Gejolak Ekonomi

---

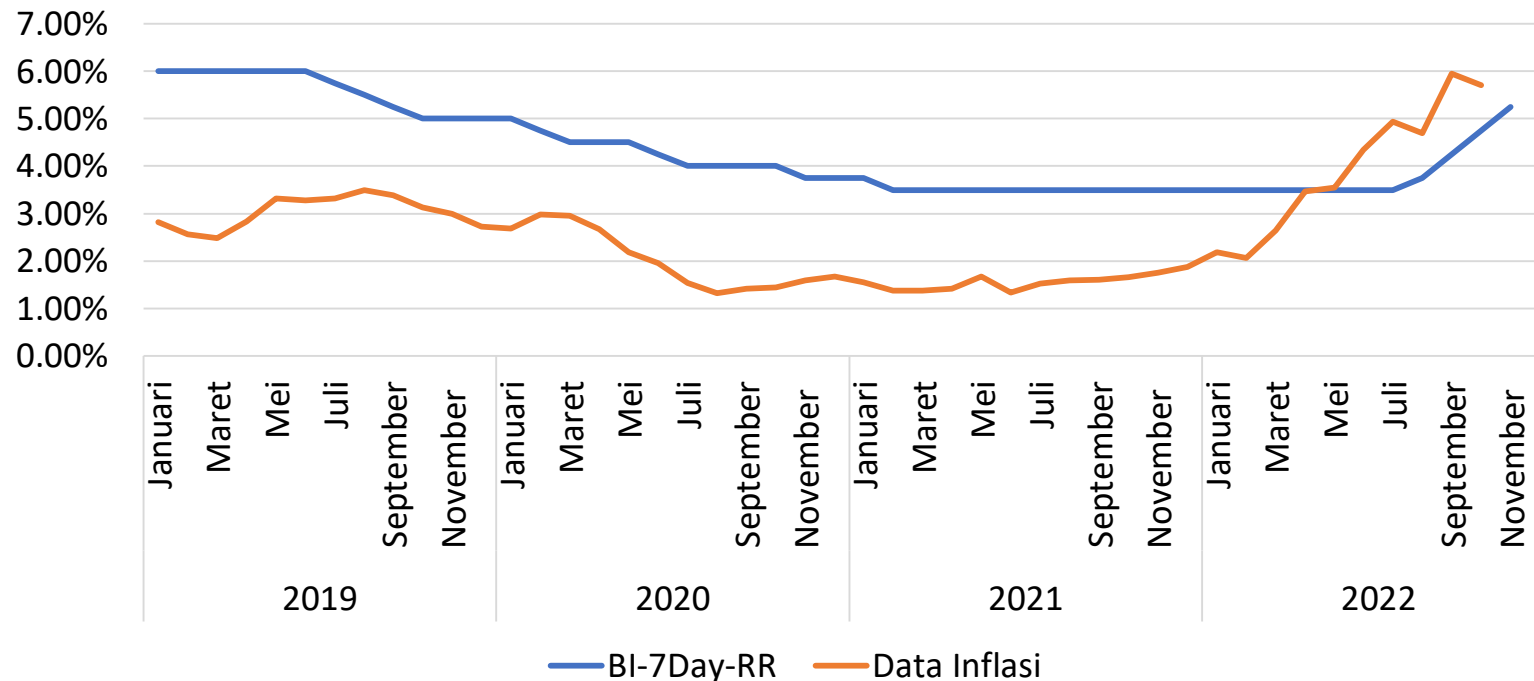
## 3.2. Ruang Fiskal dan Utang Pemerintah Pusat

- Setali tiga uang dengan belanja subsidi yang belum mencerminkan seluruh bantuan untuk BBM dan listrik, karena ada belanja kompensasi, **belanja sosial pun belum mencerminkan semua belanja untuk kepentingan sosial.**
- Belanja untuk **perlindungan sosial nilainya di 2021 adalah sebesar 468,2 triliun rupiah**, sementara **nilai belanja sosial adalah sebesar 173,6 triliun rupiah**. Belanja perlindungan sosial ini juga ditaruh bebannya pada belanja pemerintah lainnya seperti misalnya pada belanja lain-lain. Anggaran belanja perlindungan sosial di 2021 mencapai 502,6 triliun rupiah, dan di 2023 anggarannya sebesar 479,1 triliun rupiah.
- Sehingga Pemerintah sebenarnya menyokong daya beli masyarakat dengan anggaran yang besar. Hal ini menjadi sangat rentan pada kapasitas APBN terutama ketika terjadi shock pada ekonomi. Pemerintah perlu mencari *exit strategi* yang tepat untuk program-program bantuan dengan menjadikan masyarakat lebih mandiri dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia sesuai target RPJMN.
- **Peningkatan suku bunga dan pengetatan likuiditas di tingkat global perlu menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi kapasitas fiskal lewat channel pembiayaan melalui SBN di pasar global.**

### 3. Ketahanan Fiskal dan Respon Kebijakan Moneter di tengah Gejolak Ekonomi

#### 3.3. Inflasi dan Respon Kebijakan Moneter

Perkembangan Inflasi dan Suku Bunga Acuan Bank Indonesia



- Pada Oktober **peningkatan suku bunga acuan BI diikuti dengan penurunan angka inflasi Oktober (yoy) meski masih tinggi**, suku bunga acuan naik 50 bps ke 4.75 persen dan inflasi turun ke 5.71 persen dari 5.95 persen di September.
- Sementara itu, berdasarkan Laporan Survei Pembiayaan Perbankan Oktober 2022 yang dikeluarkan Bank Indonesia terlihat adanya **penurunan penyaluran kredit baru pada kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumsi, dan kredit konsumsi lainnya** pada Oktober 2022. Penurunan ini juga dipicu oleh pesimisme pelaku usaha terhadap permintaan produk baik domestik dan global.

Sumber: Bank Indonesia, 2022

## 3. Ketahanan Fiskal dan Respon Kebijakan Moneter di tengah Gejolak Ekonomi

---

### 3.3. Inflasi dan Respon Kebijakan Moneter

- Penurunan kredit konsumsi ini juga didukung oleh hasil Survei Konsumen di Oktober 2022 yang dikeluarkan BI. Pada komposisi penggunaan pendapatan rumah tangga tergambar bahwa proporsi tabungan terhadap pendapatan menurun di Oktober, begitu juga dengan porsi cicilan pinjaman, sementara untuk konsumsi meningkat di Oktober. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam daya beli masyarakat sehingga lebih banyak memegang uang cash dibanding menabung.
- Tantangan di 2023 di sektor moneter dari domestik adalah inflasi yang tinggi dan depresiasi rupiah yang diprediksi berlanjut di 2023. Jika inflasi dan depresiasi rupiah terus berlanjut di 2023, maka dapat berdampak pada pencapaian pertumbuhan ekonomi.

### 3. Ketahanan Fiskal dan Respon Kebijakan Moneter di tengah Gejolak Ekonomi

#### 3.4 Kebijakan Moneter dan Fiskal Terhadap Pencapaian Target Pembangunan

##### Target Pembangunan 2023 dan Pencapaian Target 2022

- Kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia telah bersinergi cukup baik sejak pandemi berlangsung hingga saat ini di masa pemulihan.
- Bank Indonesia membantu kecukupan anggaran pemerintah dengan skema *burden sharing* pada SBN selain menjaga inflasi dan nilai tukar.
- Di sisi fiskal, Pemerintah telah melakukan efisiensi belanja dengan mengalihkan mengurangi proporsi belanja pegawai dan mengalihkan pada belanja untuk menopang kesejahteraan masyarakat dalam bentuk belanja sosial dan belanja lain-lain. Hal ini tercermin dari capaian target pembangunan yang berhasil terpenuhi, meski tidak semua.

Target Pembangunan	2021	Sasaran 2022	Capaian 2022	Sasaran 2023
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6.49	5.5-6.3	5.86	5.3 - 6.0
Tingkat Kemiskinan (%)	9.71	8.5-9.0	9.54 (maret)	7.5 - 8.5
Rasio Gini (Nilai)	0.381	0.376-0.378	0.384 (maret)	0.375 - 0.378
Indeks Pembangunan Manusia (Nilai)	72.29	73.41-73.46	72.91	73.31 - 73.49
Nilai Tukar Petani	104.63	103-105	107,27 (oktober)	105 - 107
Nilai Tukar Nelayan	104.69	104-106	105,24 (oktober)	107 - 108

Sumber: Nota Keuangan APBN 2022 dan RAPBN 2023, BPS

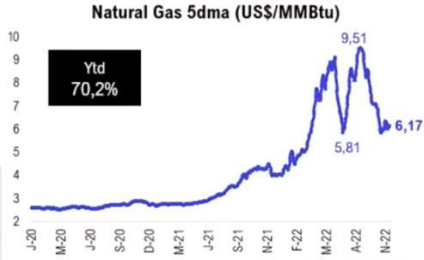


## 3. Ketahanan Fiskal dan Respon Kebijakan Moneter di tengah Gejolak Ekonomi

---

### 3.4 Kebijakan Moneter dan Fiskal Terhadap Pencapaian Target Pembangunan

Pencapaian sasaran target pembangunan di 2023 yang lebih tinggi dari sasaran 2022 perlu mendapat perhatian karena tantangan resesi global di 2023 dapat mempengaruhi ekonomi domestik. Trade off antara inflasi dan tingkat pengangguran pada jangka pendek perlu mendapat perhatian untuk mencapai saran target tingkat pengangguran di 2023. Selain itu juga inflasi yang tinggi dapat menggerus daya beli dan mempengaruhi tingkat kemiskinan dan kesenjangan, demikian juga nilai tular petani dan nelayan. Sementara itu untuk indeks pembangunan manusia perlu ada percepatan unkit di wilayah timur agar bisa mengejar wilayah barat.

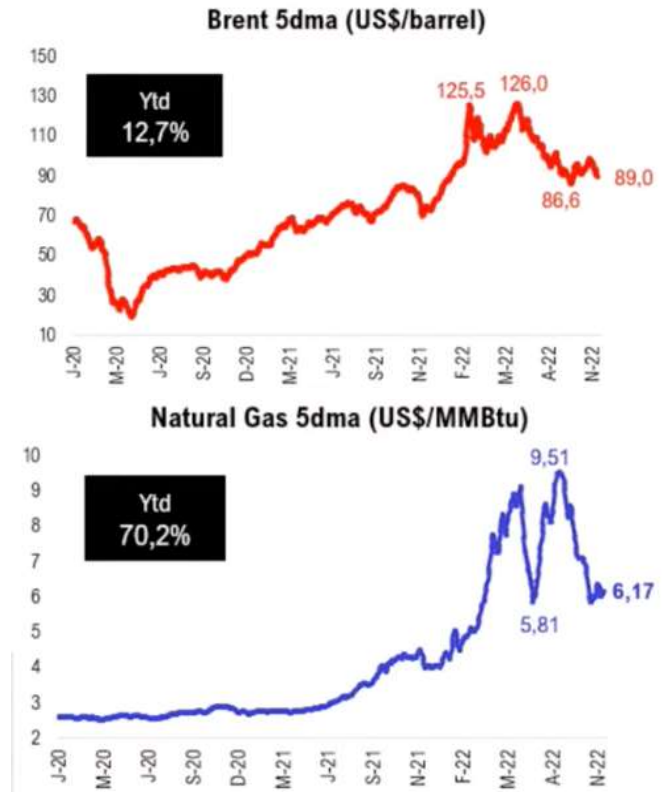


# lam Dampak Gejolak Harga Energi

## 4.1 Instabilitas Harga Komoditas Global

- Salah satu risiko besar yang menjadi ancaman stabilitas ekonomi global adalah krisis energi akibat tren peningkatan harga komoditas energi dunia.
- Harga minyak mentah jenis *Brent* ketika itu sempat melompat sampai 51,6 persen dalam setahun terakhir menjadi USD113,6/barel per 28 Juni 2022. Begitupun dengan harga gas alam (natural gas) yang melonjak sampai 80 persen menjadi USD6,6/MMBtu per 28 Juni 2022 (yoy). Meskipun kini tren harga kedua komoditas energi tersebut telah mengalami tren penurunan sejak pertengahan tahun 2022, namun harganya masih lebih tinggi dibandingkan level awal tahun 2022 (*year to date*, per 22 November 2022) yaitu Brent 12,7 persen dan Natural Gas 70,2 persen.
- Krisis energi ini dikhawatirkan akan berlangsung lama seiring tidak selesainya konflik Rusia-Ukraina. Asalnya sangat jelas, Rusia merupakan penghasil minyak bumi terbesar kedua dunia yang bukan merupakan anggota OPEC. Selain itu, Rusia dan Ukraina berperan besar dalam ekspor biji-bijian, minyak nabati dan pupuk.
- Perang Rusia-Ukraina dan sanksi ekonomi negara-negara barat terhadap Rusia membuat rantai suplai biji-bijian, minyak nabati, pupuk serta minyak dan gas di pasar global sangat terganggu, yang pada gilirannya memicu lonjakan harga yang dratis dari komoditas di atas.

## Perkembangan Harga Minyak Mentah dan Gas Alam

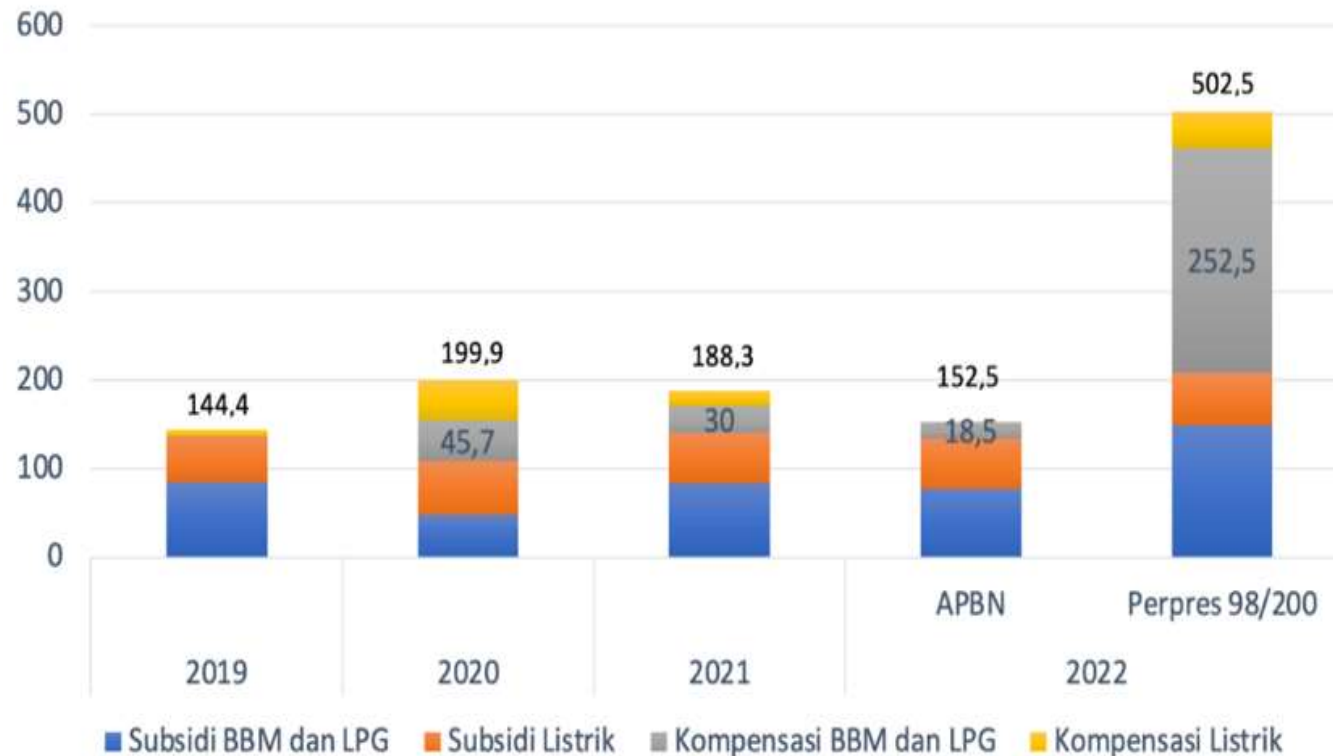


Sumber: Bloomberg, Kemenkeu, 2022

## 4. Meredam Dampak Gejolak Harga Energi

### 4.2. Mengendalikan Harga Energi

Kenaikan Subsidi dan Kompensasi Energi Tahun 2022 (Rp triliun)



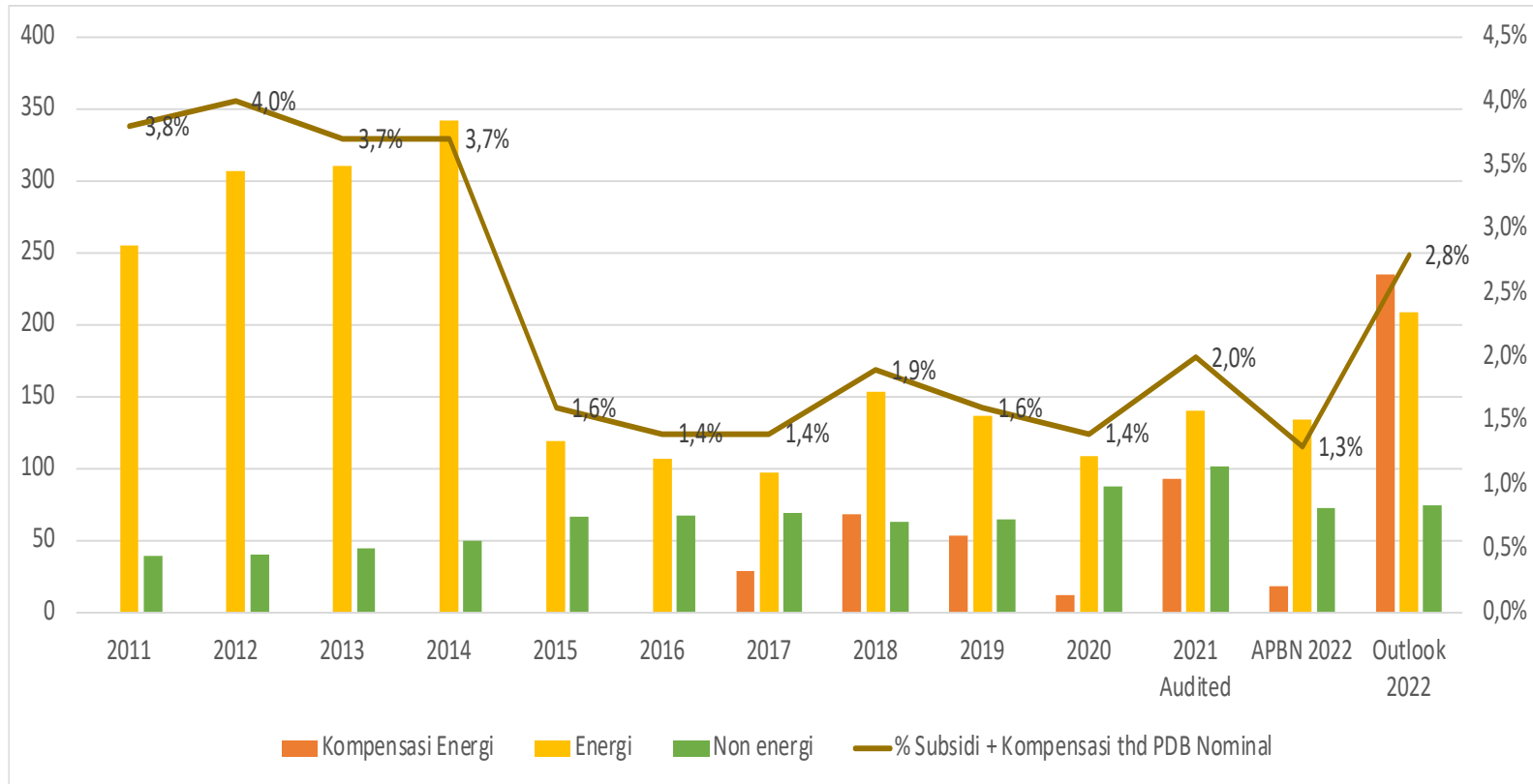
Kenaikan harga minyak mentah dan gas dunia telah melampaui asumsi dalam APBN 2022. Akibatnya, harga keekonomian BBM subsidi meningkat dan berimplikasi terhadap tambahan subsidi dan kompensasi energi. Di sisi lain, konsumsi BBM subsidi meningkat pesat sehingga kuota BBM subsidi berpotensi habis di bulan Oktober 2022. Potensi over kuota Pertalite hingga akhir tahun 2022 mencapai 126 persen dari kuota (29,07 juta KL) dan Solar 115 persen (17,44 juta KL). Begitupun dengan konsumsi LPG 3 Kg yang terus meningkat dari 7,5 juta MT (tahun 2021) menjadi 8 juta MT (tahun 2022) dan berpotensi bertambah menjadi 8,3 juta MT pada tahun 2023.

Sumber: Kemenkeu, 2022

# 4. Meredam Dampak Gejolak Harga Energi

## 4.2. Mengendalikan Harga Energi

Perkembangan Subsidi dan Kompensasi 2011-2022 (Rp Triliun)



Kombinasi kenaikan harga minyak mentah dan melonjaknya permintaan BBM subsidi memaksa pemerintah mengambil keputusan dilematis apakah harus menambah subsidi energi atau membatasi tambahan subsidi dengan konsekuensi kenaikan harga jual eceran BBM subsidi, yang akhirnya diputuskan penyesuaian harga BBM subsidi.

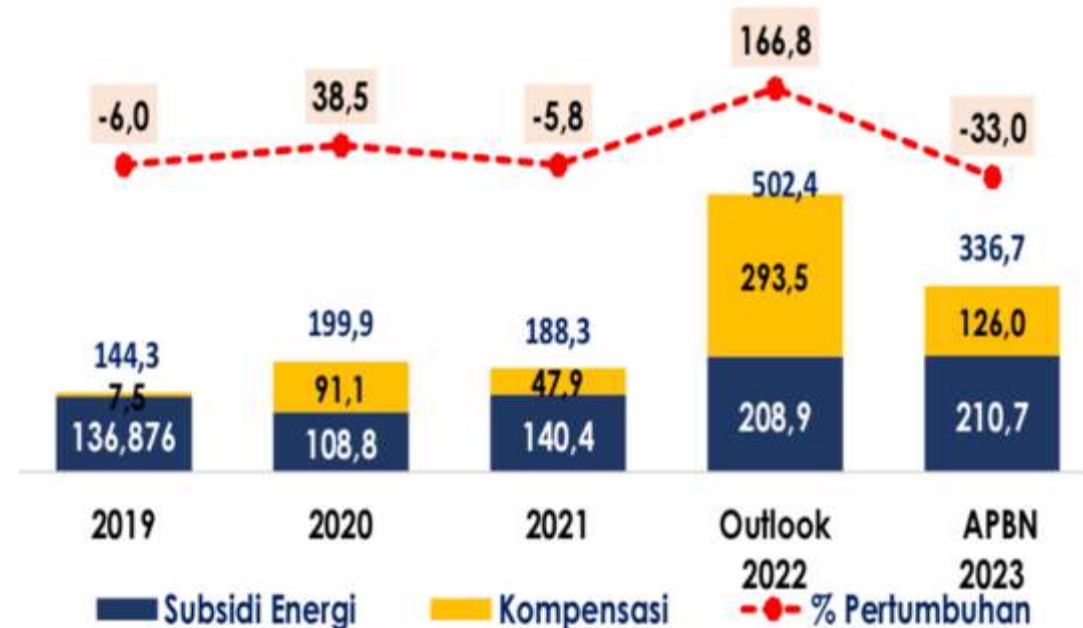
Sumber: Kemenkeu, 2022, diolah

## 4. Meredam Dampak Gejolak Harga Energi

### 4.3 Tantangan Subsidi Energi

- Keputusan pemerintah menambah anggaran subsidi dan kompensasi energi merupakan refleksi peran APBN sebagai *shock absorber* yang berfungsi untuk meredam dampak tingginya harga energi.
- Namun demikian, pemerintah juga harus cermat mengukur daya tahan fiskal dalam menahan beban stabilisasi harga energi.
- Apalagi data historis menunjukkan bahwa konsumsi BBM dan LPG bersubsidi cenderung meningkat dimana selama periode 2017–2021, volume penyaluran BBM solar bersubsidi meningkat dari 14,5 juta kilo liter pada tahun 2017 menjadi 15,6 juta kilo liter pada tahun 2021.
- Begitupun dengan penyaluran LPG 3 kg bersubsidi yang meningkat dari 6,3 juta metrik ton pada tahun 2017 menjadi 7,5 juta metrik ton pada tahun 2021.
- Fenomena migrasi konsumen nonsubsidi ke produk bersubsidi diperkirakan akan memicu terjadinya over kuota BBM subsidi.

### Subsidi dan Kompensasi Energi Tahun 2023



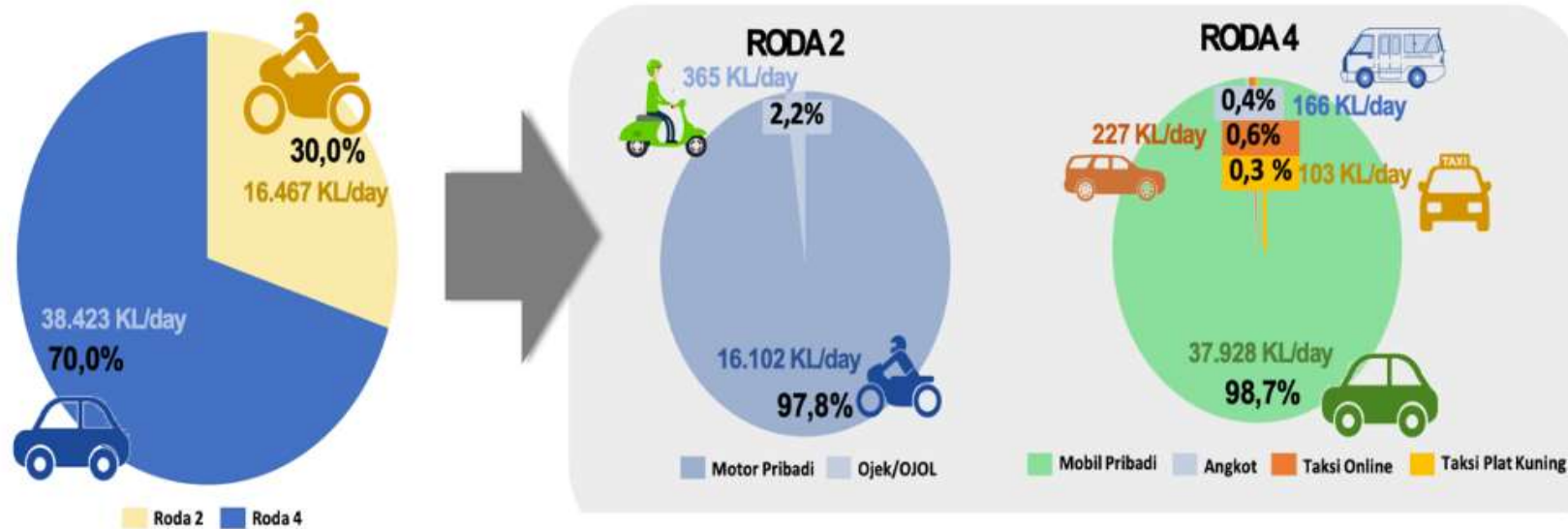
Sumber: Kemenkeu, 2022

# 4. Meredam Dampak Gejolak Harga Energi

## 4.3 Tantangan Subsidi Energi

### 4.3.1 Problem Klasik Over Kuota BBM Subsidi

Volume Konsumsi Pertalite Berdasarkan Segmen Kendaraan



Sumber: BPS, Kemenhub, Kemenkeu, 2022

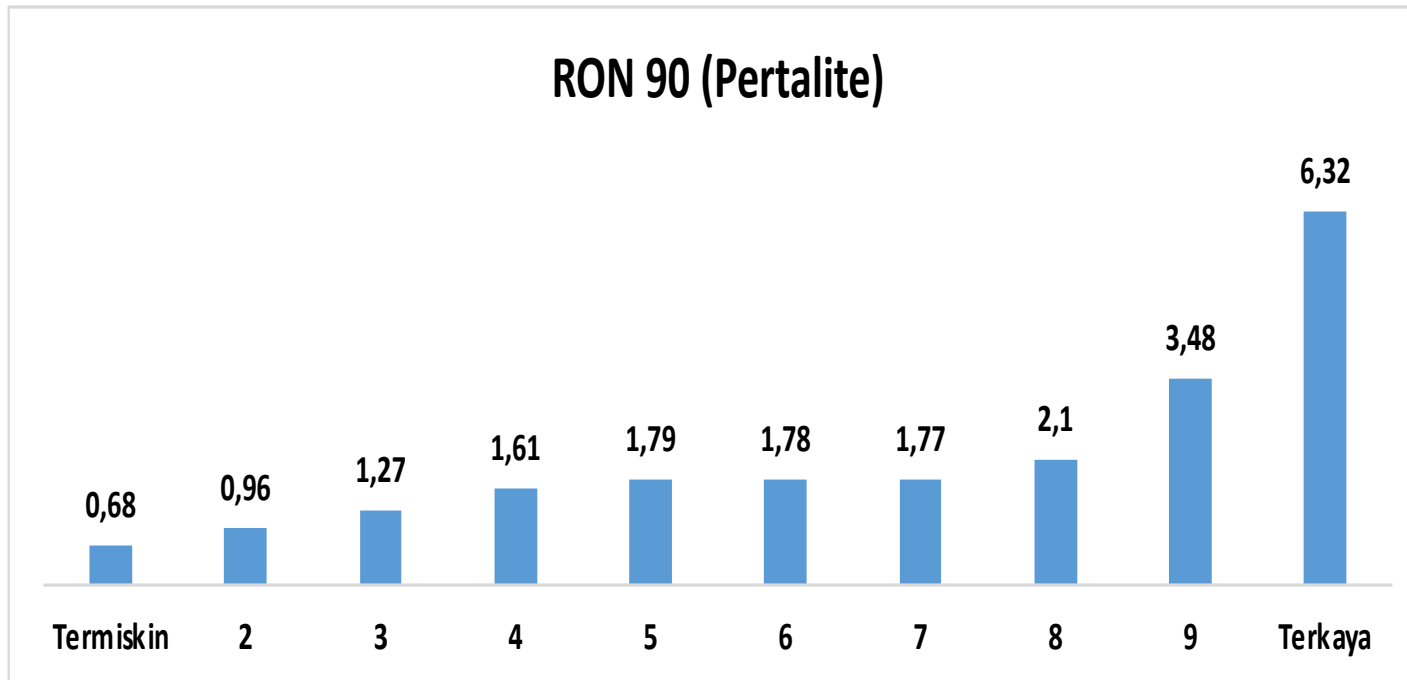
- Ketidaktepatan sasaran dalam kebijakan subsidi energi telah menciptakan ketimpangan ekonomi yang makin membesar bagi kelompok rumah tangga miskin.
- BBM bersubsidi jenis Pertalite tidak tepat sasaran sebetulnya dapat dilihat dari penjualan Pertalite yang mayoritasnya dikonsumsi oleh kendaraan roda 4 hingga 70 persen atau sekitar 34 ribu KL per hari, sedangkan kendaraan roda 2 sebesar 30 persen atau sekitar 16 ribu KL per hari.

## 4. Meredam Dampak Gejolak Harga Energi

### 4.3 Tantangan Subsidi Energi

#### 4.3.1 Problem Klasik Over Kuota BBM Subsidi

##### Komposisi Konsumen Pertalite per Desil (Juta KL)



Sumber: Susenas, BPS, 2021

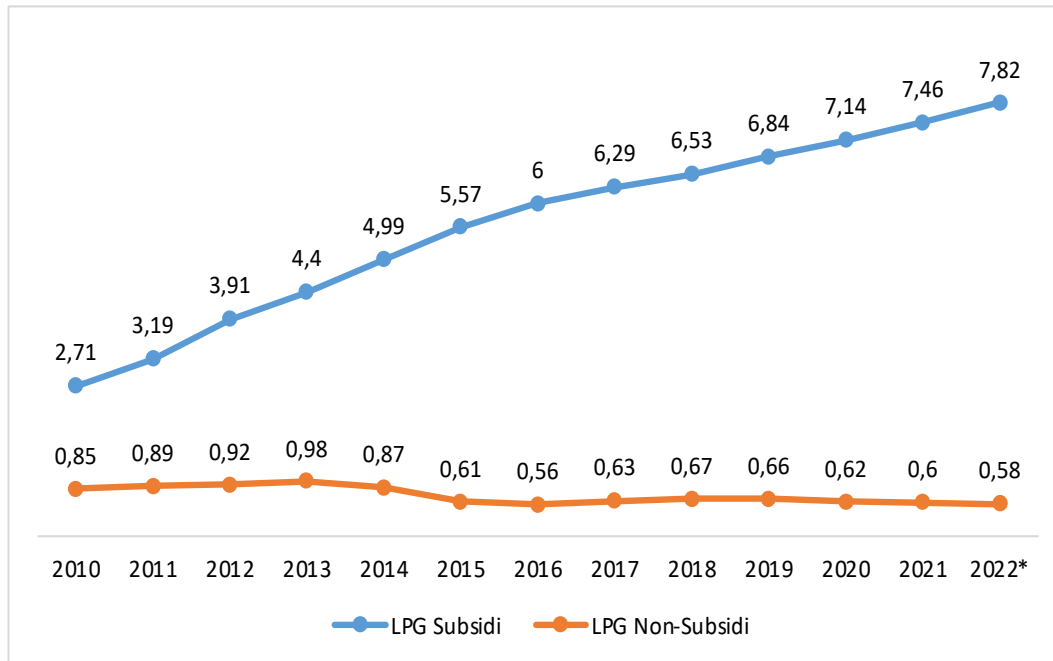
- Konsumsi BBM jenis gasoline (bensin) tahun 2021 yang didominasi oleh Pertalite sekitar 71 persen, Pertamina 18 persen, dan Premium 11 persen.
- Dari 62,9 persen total konsumsi Pertalite (setara 13,7 juta KL) dinikmati oleh 40 persen golongan teratas.
- Data menggambarkan bahwa dimana semakin tinggi pendapatan masyarakat artinya semakin tinggi kemampuan konsumsinya. Implikasinya, akibat mekanisme distribusi Pertalite yang terbuka maka masyarakat berpendapatan tinggi memiliki daya beli Pertalite yang lebih besar.

# 4. Meredam Dampak Gejolak Harga Energi

## 4.3 Tantangan Subsidi Energi

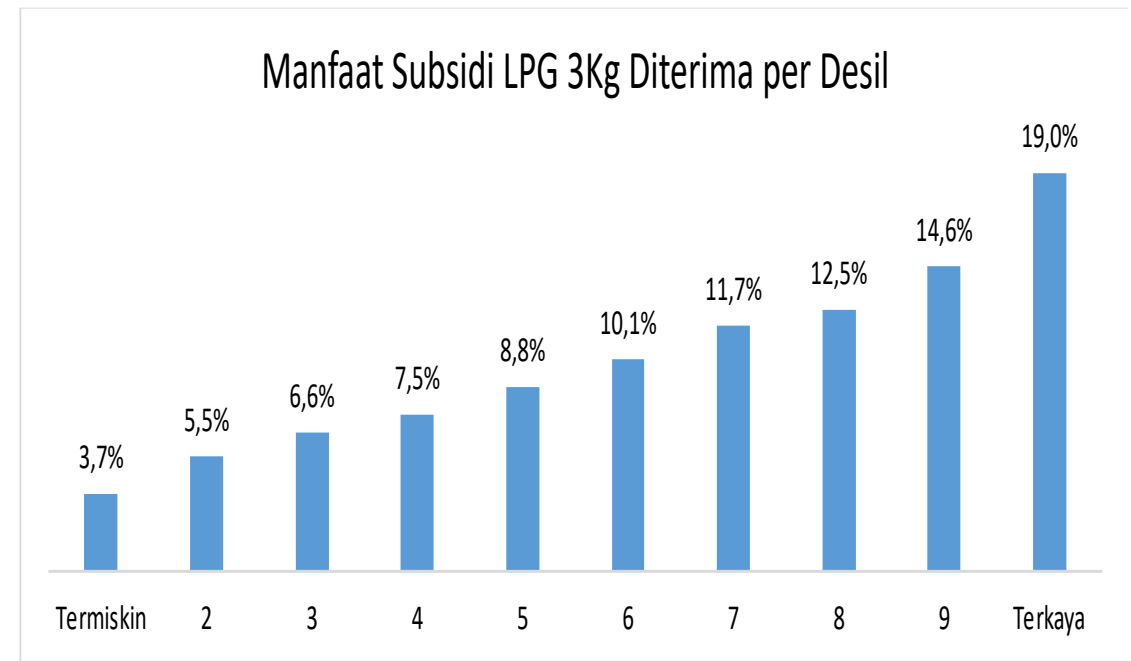
### 4.3.2 Subsidi LPG Tak Tepat Sasaran

Tren Konsumsi LPG Bersubsidi dan Nonsubsidi (Juta MT)



Sumber: Kemenkeu dan Kementerian ESDM, 2022

Distribusi LPG 3 Kg per Kelompok Masyarakat



Sumber: BPS Susenas dan Kemenkeu, 2022



## 4. Meredam Dampak Gejolak Harga Energi

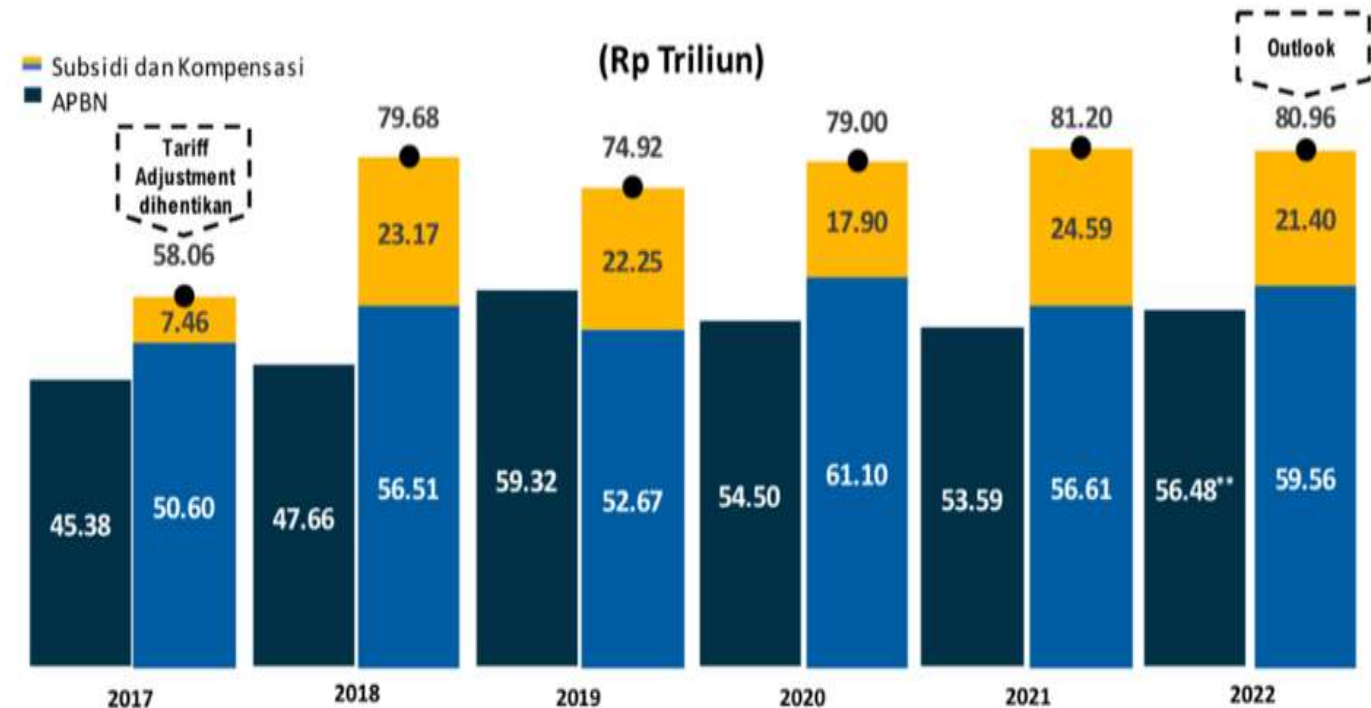
### 4.3 Tantangan Subsidi Energi

#### 4.3.3 Subsidi Berbasis Pelanggan Listrik

Dengan adanya fakta ketergantungan impor LPG dan besarnya over supply listrik nasional maka munculnya ide konversi kompor listrik seolah menjadi alternatif solusi terhadap kebijakan subsidi energi yang lebih tepat sasaran.

Justifikasi dasarnya cukup solid yaitu pemberian kompor listrik bagi rumah tangga tidak mampu dengan basis data pelanggan PLN penerima subsidi tarif listrik, baik pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA maupun 900 VA. Adapun jumlah pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA masing-masing sebesar 24,2 juta pelanggan dan 8,4 juta pelanggan atau mencapai 85 persen dari total rumah tangga yang selama ini menikmati subsidi listrik.

#### Perkembangan Subsidi dan Kompensasi Listrik (Rp Triliun)

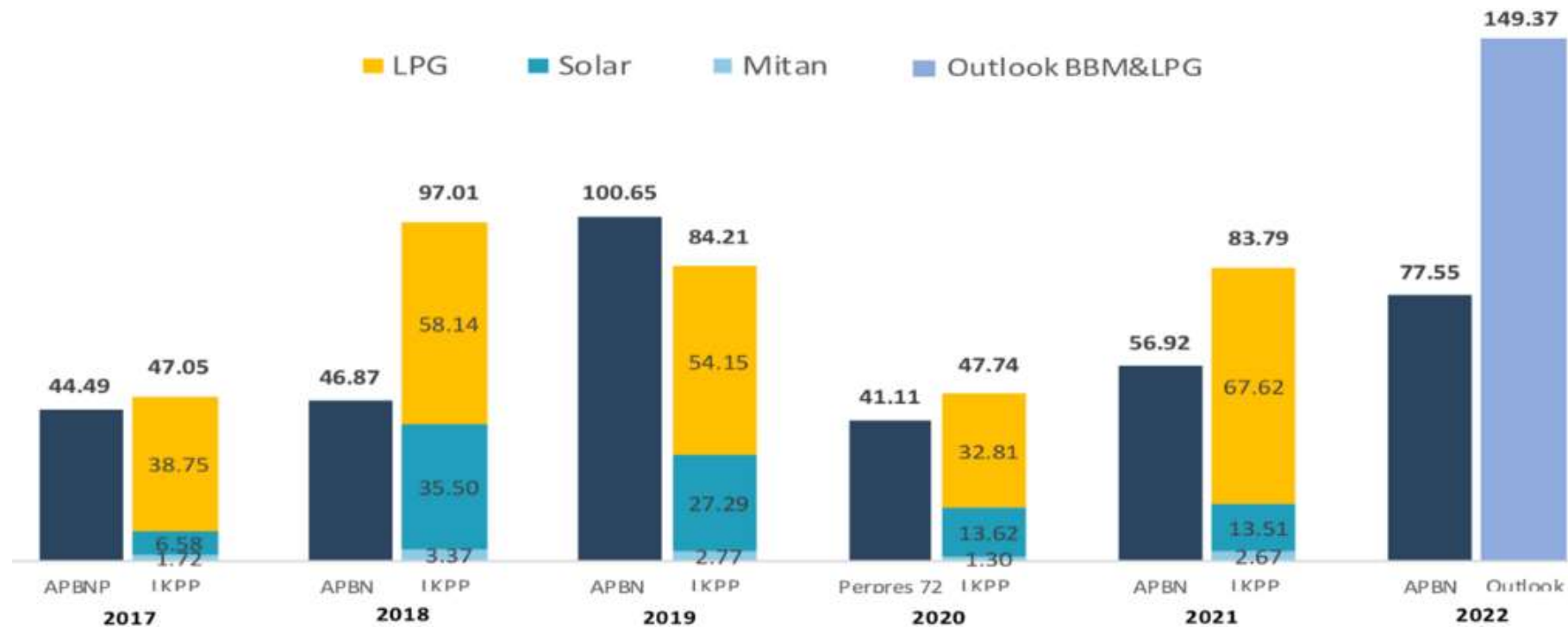


Sumber: Kemenkeu, 2022

# 4. Meredam Dampak Gejolak Harga Energi

## 4.4 Urgensi Reformasi Subsidi

Perbandingan APBN dengan Realisasi Subsidi BBM dan LPG 3Kg (Rp Triliun)



Sumber: Kemenkeu, 2022

## 4. Meredam Dampak Gejolak Harga Energi

---

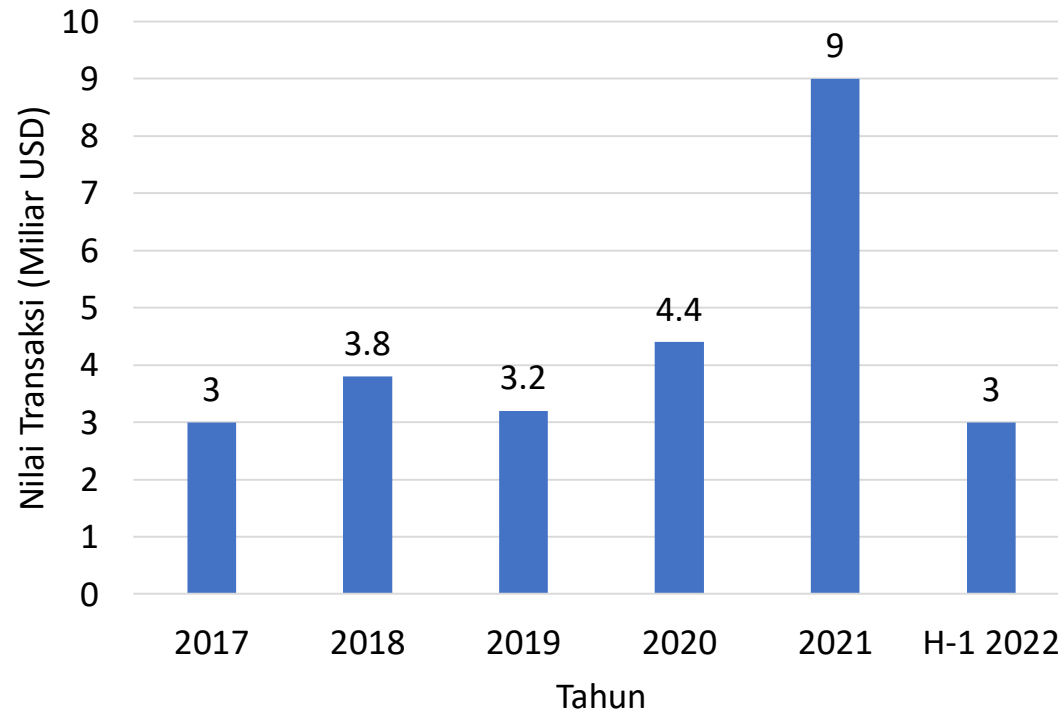
### 4.4 Urgensi Reformasi Subsidi

Transformasi subsidi energi merupakan perwujudan dari pengelolaan sumber daya energi yang berkeadilan, serta diharapkan mampu mengakselerasi peningkatan nilai tambah energi guna mendukung pembangunan inklusif di Indonesia. Oleh karena itu, integrasi bantuan/subsidi dari pemerintah ini dilakukan dalam rangka perwujudan skema perlindungan sosial menyeluruh. Kebijakan subsidi energi merupakan salah satu upaya nyata dari pemerintah untuk melakukan transformasi pelayanan publik. **Pemerintah berkewajiban melayani kebutuhan energi warga masyarakat, terutama rumah tangga tidak mampu, agar terciptanya keadilan akses energi bagi masyarakat.**

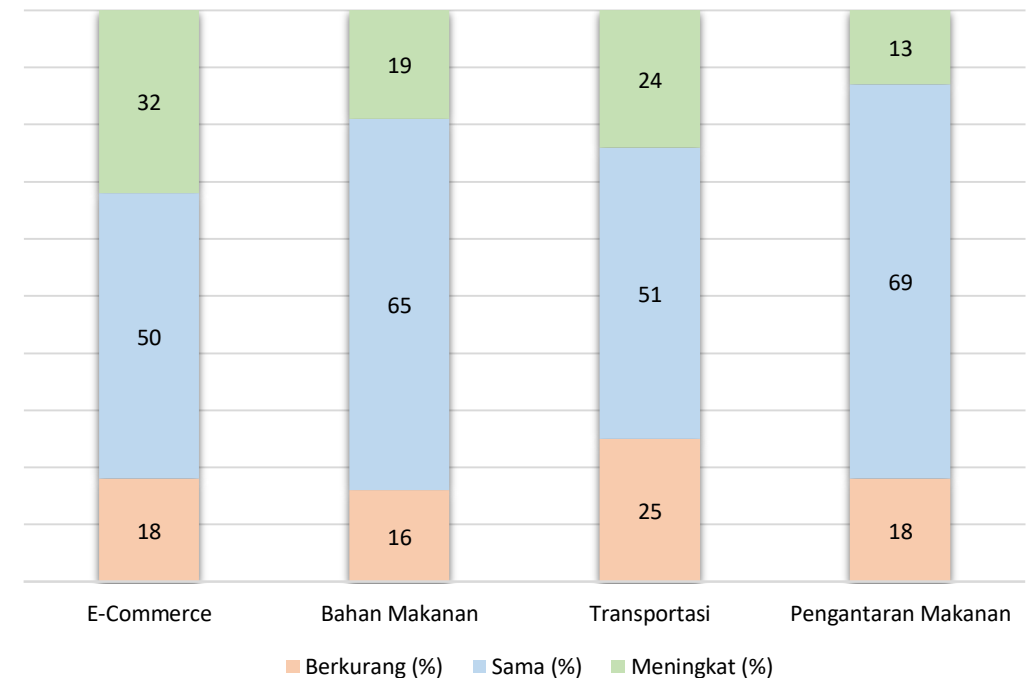
# 5. Ekonomi Digital dan UMKM

## 5.1 Ekonomi Digital Dalam Perekonomian Indonesia

Nilai investasi industri digital Indonesia  
2017-H1 2022 (Miliar USD)



Kecenderungan Menggunakan Jasa Layanan Digital  
secara Sektoral dalam 12 Bulan Kedepan

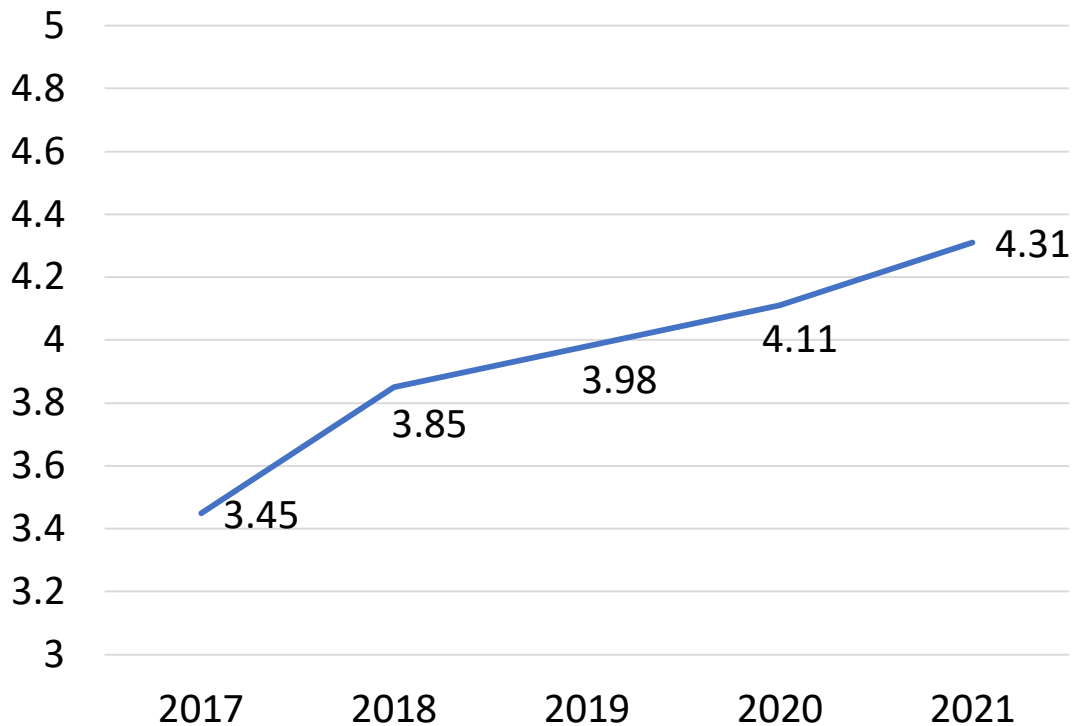


Sumber: Google, Temasek, and Bain (2022)

# 5. Ekonomi Digital dan UMKM

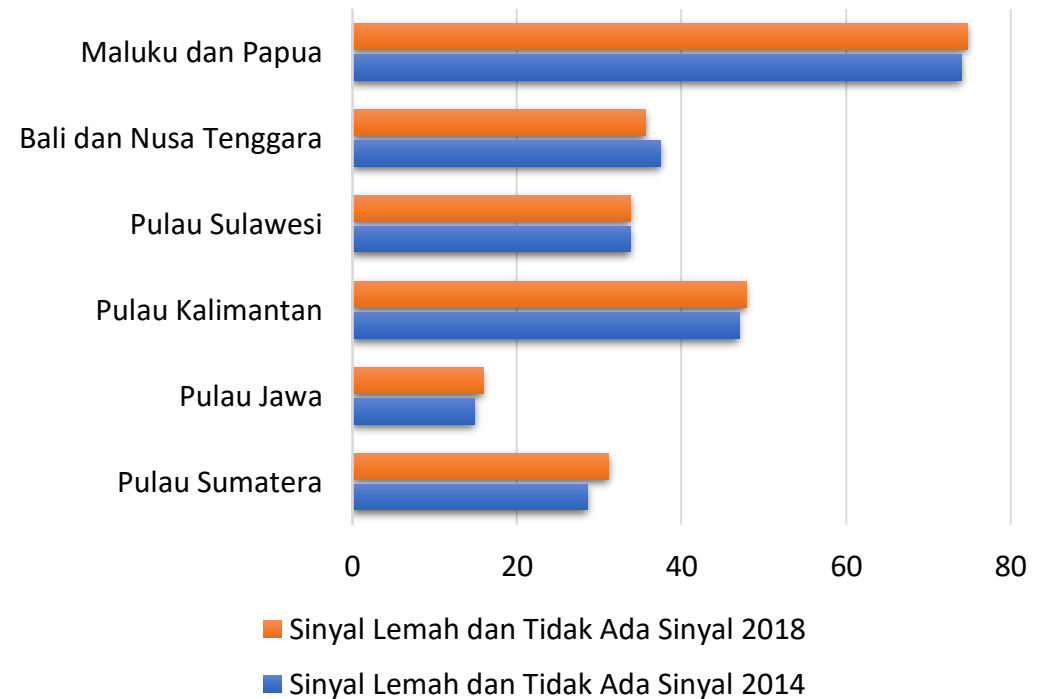
## 5.1 Ekonomi Digital Dalam Perekonomian Indonesia

Selisih Nilai Tertinggi dan Terendah pada Indeks Pengembangan TIK Provinsi, 2017-2021



Sumber: BPS, diolah(2022)

Presentase Desa dengan Sinyal Seluler Lemah dan Tidak Ada Sinyal Berdasarkan Wilayah, 2014 & 2018 (dalam persen)



Sumber: BPS, 2020

# 5. Ekonomi Digital dan UMKM

---

## 5.2. UMKM di era Digital

- Terdapat sekitar 17 persen UMKM berjualan secara daring atau berjumlah 19,5 juta UMKM pada tahun 2022. Adapun pemerintah punya target agar UMKM bisa masuk ekosistem digital dengan jumlah 30 juta UMKM pada tahun 2024. Selisih lebih dari 10 juta UMKM bisa berjualan secara daring untuk dapat dicapai dalam waktu 2 tahun merupakan sebuah tantangan.
- Menurut survei Bank Dunia terhadap **15.000 UMKM Indonesia yang telah menggunakan e-commerce, 78,6 persen UMKM tetap berbisnis di masa pandemi**. Lebih lanjut, hasil studi menunjukkan bahwa UMKM yang sudah menggunakan *e-commerce* pulih lebih cepat dibandingkan UMKM yang belum menggunakan *e-commerce*.
- Laporan BCG (2022) menyebutkan bahwa **digitalisasi tersebut membuat UMKM mampu meningkatkan pendapatan 1,1 kali lebih besar, menaikkan penjualan lebih luas di dalam negeri lebih dan luar negeri sebesar 2,1 kali dan 4,6 kali lipat lebih besar**. Laporan tersebut juga menyebutkan 3 alasan utama UMKM tidak menggunakan *e-commerce*, yakni terbatasnya permodalan untuk melakukan ekspansi usaha secara daring (28,8 persen), kurangnya literasi digital (27 persen), dan tiadanya alat dan *gadget* yang memadai (10,8 persen).

## 5. Ekonomi Digital dan UMKM

---

### 5.3. Isu Strategis UMKM Tahun 2023

Pemerintah memiliki perhatian kepada pengembangan UMKM. Salah satu isu yang mengemuka adalah **target pemerintah berupa 30 juta UMKM go digital pada tahun 2024**. Namun, hal tersebut menghadapi sejumlah tantangan, yaitu:

1. Adanya fenomena *missing middle* dalam struktur UMKM di Indonesia berdasarkan jumlah tenaga kerja dan kontribusi PDB.

2. Penyaluran kredit nasional masih didominasi penyaluran kredit kepada usaha besar, yakni sekitar 80 persen kredit nasional, dan kredit kepada UMKM hanya 20 persen.

## 6. Proyeksi Ekonomi Indonesia 2023

---

### Tantangan Global

Inflasi tinggi

Pengetatan moneter: suku bunga tinggi

Eskalasi perang Rusia-Ukraina

Harga energi tinggi

Likuiditas keuangan global ketat

*Capital outflow dari emerging market*

### Tantangan Domestik

Menjelang pemilu investor wait and see

Inflasi tinggi membayangi

Penurunan daya beli

Peningkatan biaya produksi

Depresiasi rupiah

Inflasi pangan dan transportasi

Bayangan PHK berlanjut



## 6. Proyeksi Ekonomi Indonesia 2023

---

### Proyeksi Indikator Ekonomi Indonesia 2023

Indikator	Proyeksi INDEF
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,8%
Nilai Tukar Rp/US\$	Rp16.000
Tingkat Inflasi (%)	5.6%
Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)	5.7%
Tingkat Kemiskinan (%)	9.3%

Sumber: Proyeksi Ekonomi 2023 - INDEF (2022)

TERIMAKASIH

*INDEF*